

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) diharuskan menyusun Rencana Kerja Tahunan ( RKT ), Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur staf yang melayani Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat baik secara Administrasi maupun secara teknis. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya. Sesuai dengan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) . Penyusunan Rencana Kerja SKPD Sekretariat DPRD Sumatera Barat tahun 2017 disusun sesuai dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

#### **a. Latar Belakang**

Rencana Kerja ( Renja ) SKPD Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 merupakan rencana tahunan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2017 yang menjadi landasan/pedoman/acuan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Rencana Kerja (Renja) ini disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk digabung menjadi Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah ( RKPD ). Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 nantinya akan diformulasikan dalam Rencana Strategis ( Renstra ) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya akan disusun untuk masa periode 2016-2021.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 sudah melakukan kajian dan pertimbangan terhadap capaian kinerja tahun 2015 dan capaian kinerja terhadap Rencana Strategik Sekretariat DPRD tahun 2010-2015.

Penyusunan Renja ini dilakukan dengan menghimpun masukan-masukan dari seluruh bagian-bagian yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, baik Bagian Perisidangan, Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Bagian Publikasi dan Informasi. Rencana Kerja ini merupakan pedoman guna Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, Tugas Pokok Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah Menyelenggarakan Administrasi kesekretariatan, Administrasi Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, sesuai

dengan kemampuan keuangan daerah, dengan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan Administrasi keuangan DPRD;
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
4. Penyelenggaraan koordinasi tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD..

Rencana Kerja ( Renja ) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 masih mengacu kepada Penyempurnaan Rensra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2015 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) tahun 2015 namun dalam RKPD tahun 2015 tidak terdapat usulan program yang disusun dalam Penyempurnaan Rencana Strategik (Renstra) Sekretariat DPRD yaitu program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah dengan kegiatan Pengelolaan dan Pendataan Dokumen/Arsip Daerah, ini penting dalam rangka memberikan pelayanan kepada DPRD dengan mendata dan mendokumentasikan seluruh produk-produk yang dihasilkan oleh DPRD baik dalam satu tahunan maupun dalam lima tahunan sehingga dengan pendataan yang rapi sewaktu-waktu dibutuhkan produk-produk DPRD dapat ditemukan sekita dengan tidak membutuhkan waktu yang begitu lama ini merupakan salah satu perwujudan pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

Dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD hubungan dengan Renja kementerian/lembaga ada satu Program yaitu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah dengan beberapa kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD, dan kaitannya Renja Sekretariat DPRD dengan Kabupaten/kota secara langsung belum jelas namun dengan dilaksanakan fungsi Dewan yaitu fungsi pengawasan, maka secara tidak langsung ada keterkaitan antara Renja Sekretariat DPRD dengan Renja Kab/kota, Renja yang disusun adalah kunjungan Kerja Dalam Daerah yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melakukan pengawasan dan monitoring terhadap program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan di Kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Rencana Kerja yang diajukan oleh Sekretariat DPRD tahun 2017 dengan beberapa program dan kegiatan nantinya akan menjadi dasar pengalokasian dana dalam penyusunan KUA PPAS tahun 2017 untuk menjadi RAPBD yang akan ditetapkan menjadi APBD Tahun 2017.dengan catatan Rancangan Rencana Kerja tersebut harus mendapat legitimasi oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam RKPD Pemerintah Daerah.

#### **b. Landasan Hukum**

Yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 21 ayat ( 3 ) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran negara nomor 4438).
3. Undang–Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
4. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan terakhir Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (lembaran negara tahun 2005 nomor 150, tambahan lembaran negara nomor 4614).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pasal 40 ayat 2 huruf j dijelaskan bahwa pada masa transisi, untuk menghindari kekosongan, seperti peralihan periode kepemimpinan maka RPJMD lama yang akan berakhir menjadi pedoman sementara bagi pemerintahan kepala daerah baru terpilih selama belum ada RPJMD baru.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
10. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.
11. Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 7 Tahun 2008 Tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat. Tahun 2005-2025
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Perda No. 5 tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015
13. Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 16 tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

**c. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 disusun dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Kegiatan Sekretariat DPRD Propinsi Sumatera Barat tahun 2017, agar program dan kegiatan yang disusun dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan tujuan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi Dewan.

Sebagai tujuan dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2017 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Memberikan gambaran rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat baik yang bersifat wajib maupun pilihan sesuai urusan dan kewenangan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.
2. Menetapkan indikator program/kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan kegiatan tahun 2017.
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2017.
4. Menjadi panduan dalam meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2017.

**d. Sistematika Penulisan**

**BAB I. PENDAHULUAN**

Menguraikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2015**

Memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015 dan capaian Renstra Sekretariat DPRD, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD dan Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

**BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017**

Menguraikan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Daerah, Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, Program dan Kegiatan dan Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

**BAB IV PENUTUP**

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA**  
**SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2015**

a. **Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.**

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2015 terdapat 10 (sepuluh) Program dan 54 (lima puluh empat) kegiatan, Program dan kegiatan yang ada tersebut telah dilaksanakan, namun di dalam pelaksanaannya ada kegiatan yang melebihi target kinerja, telah memenuhi target kinerja dan ada kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja, baik secara fisik maupun keuangan

Berdasarkan hasil evaluasi pada akhir Tahun Anggaran 2015 terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak memenuhi target dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdapat 3 (tiga) kegiatan yang tidak memenuhi target keuangan dari 17 (Tujuh belas) kegiatan diantaranya adalah :**

a. **Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**

Kegiatan penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan terhadap bahan bacaan dan buku-buku,. Kegiatan ini pada tahun anggaran 2015 secara fisik kegiatan dapat dilaksanakan 100%, dengan realisasi keuangan hanya sebesar 84.14%. Penyebab rendahnya realisasi keuangan kegiatan disebabkan karena belanja surat kabar dan majalah dibawah perkiraan sehingga terjadi selisih antara realisasi dengan penganggaran

b. **Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur**

Kegiatan penyediaan Pembinaan mental dan fisik aparatur dilaksanakan dalam bentuk wirid mingguan dan senam kesegaran jasmani ( SKJ ) yang dilaksanakan setiap minggu pada jam dinas kantor dengan jadwal adalah sebagai berikut : wirid mingguan dilaksanakan setiap pagi jumat dilaksanakan pukul 07.30 sampai pukul 08.30 dengan mendatangkan penceramah/Dai yang ada di kota Padang pelaksanaannya diluar pelaksanaan wirid di Masjid Raya Sumatera Barat, dan senam kesegaran jasmani dilaksanakan setiap pagi Rabu dengan mendatangkan instruktur senam dari kota padang yang pelaksanaannya dari pukul 07.30 s.d. 08.30. Secara fisik kegiatan ini terlaksana sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar 50.29 %. Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena kurangnya pelaksanaan wirid di kantor karena acara wirid mingguan dialihkan pada Masjid Raya sehingga acara wirid dijadwalkan 4 kali dalam satu bulan hanya terlaksana sebanyak 2 ( dua ) kali begitu juga acara senam pagi pada bulan puasa acara senam tidak diadakan.

c. **Pengelolaan dan Pendataan Dokumen Arsip SKPD**

Kegiatan pengelolaan dan pendataan dokumen arsip, kegiatan ini bertujuan untuk mendata seluruh dokumen-dokumen di Sekretariat DPRD khusus untuk dokumen yang berkaitan dengan produk DPRD, sidang dan rapat DPRD sehingga seluruh dokumen terdata dengan

baik dan apabila diperlukan sewaktu-waktu dokumen tersebut dapat ditemukan dengan tidak membutuhkan waktu yang begitu lama untuk mendapatkannya. Kegiatan ini sampai akhir tahun 2015 secara fisik terlaksana sebesar 95% dengan realisasi keuangan sebesar 72.75%, rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini karena pengadaan Belanja Modal Pengadaan Sistem Komputer tidak dilaksanakan karena Pejabat pengadaan tidak menemukan spesifikasi dari BM sistem komputer diatas.

**2. Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada 6 ( enam ) kegiatan yang tidak memenuhi target keuangan dari 17 ( tujuh belas ) kegiatan diantara adalah sbb :**

**a. Pembangunan Gedung Kantor**

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mendukung dan memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sampai pada akhir tahun 2015 kegiatan fisik tidak jadi dilaksanakan karena diluncurkan tahun 2016, yang dianggarkan pada tahun 2015 adalah biaya pengelola teknis dan biaya perencanaan secara fisik kegiatan dapat terlaksana 100% namun dari segi keuangan dibawah target karena penganggaran pengelola teknis tidak dilakukan perubahan karena pada waktu menyusun perubahan kita belum dapat mengetahui berapa jumlah biaya pengelola teknis, sehingga pada waktu pembayaran biaya pengelola teknis dibawah anggaran yang disediakan sehingga terjadi sisa pada akhir tahun anggaran sehingga menyebabkan realisasi keuangan dibawah target yang ditetapkan. Hanya sebesar 76.35%.

**b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi**

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Studio sasaran kinerjanya adalah terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala serta perawatan terhadap alat studio kantor dan rumah dinas DPRD Sumatera Barat, Sampai akhir tahun 2015 secara fisik kegiatan ini terlaksana 100% dengan realisasi keuangan sebesar 69.79%. Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini karena pemeliharaan terhadap alat studio sebagian tidak dilakukan karena anggaran yang dianggarkan untuk pemeliharaan peralatan studio ini dianggarkan untuk berjaga-jaga kalau terjadi kerusakan maka dilakukan perbaikan.

**c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas**

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas ini bertujuan untuk melakukan pemeliharaan terhadap rumah Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan agar rumah dinas dapat terpeliharaan dengan baik. . Sebagai wujud dari tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sampai akhir tahun 2015, secara fisik kegiatan ini terlaksana 100 % dan realisasi keuangan sebesar 41.83%. Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan oleh karena pemeliharaan terhadap rumah jabatan/dinas seperti pelaksanaan pengecatan tidak dilaksanakan sehingga terjadi penghematan dalam pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan realisasi keuangan kegiatan rendah..

**d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Kegiatan ini bertujuan untuk memelihara peralatan dan perlengkapan kantor untuk

menunjang kegiatan Sekretariat DPRD dengan tujuan kegiatan DPRD dapat terlaksana dengan baik, sampai akhir tahun 2015 secara fisik kegiatan ini terlaksana sebesar 100% dengan realisasi keuangan hanya mencapai 80.24%. Rendahnya realisasi keuangan ini karena dalam pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor terjadi penghematan, sehingga pengeluaran pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor dapat ditekan.

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur

Kegiatan ini ditujukan agar terpelihara dan terawatnya meubeleur dengan baik, guna untuk mendukung kelancaran tugas-tugas di DPRD Provinsi Sumatera Barat, dengan terpeliharanya meubeleur dapat mendukung kelancaran tugas-tugas DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sampai akhir tahun 2015 secara fisik kegiatan ini terlaksana 100% dengan perbandingan antara realisasi fisik dengan target hasil yaitu  $\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$  dengan realisasi keuangan sebesar 42.20% rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini dari batas minimal yang disepakati antara Gubernur dengan kepala SKPD disebabkan karena belum dilaksanakan pemeliharaan terhadap meubeleur kantor karena meubeleur yang ada masih dalam kondisi baik dana yang dianggarkan adalah untuk berjaga-jaga kalau dilakukan perbaikan terhadap meubeleur yang ada.

3. **Pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur** ada 1 ( satu ) kegiatan, kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dari dua kegiatan yang semula program ini 2 ( dua ) kegiatan pada perubahan anggaran kegiatan Pelantikan Gubernur dihilangkan karena kegiatan ini tidak dilaksanakan di Sekretariat DPRD yang ada hanya kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan kelengkapannya

4. **Pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ada 4 (empat) kegiatan yang tidak memenuhi target dari 4 kegiatan yang ada pada Program ini kegiatan tersebut adalah :**

a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan adalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan wawasan, pemahaman dan kemampuan staf terhadap peraturan perundang-undangan, kegiatan ini terlaksana adanya undangan atas kerjasama pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat atau lembaga pendidikan, kegiatan ini secara fisik sampai akhir tahun 2015 terlaksana sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar 28.84% rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang diadakan oleh Pemerintah baik pemerintah daerah maupun pusat, kegiatan dapat terlaksana berdasarkan undangan yang disampaikan.

b. Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan ini ditujukan untuk menambah pengetahuan dan kemampuan staf, meningkatkan wawasan dibidang tugas masing-masing karena peraturan yang berkaitan dengan bidang tugas selalu berubah-ubah dan berkembang terus menerus. Kegiatan bimtek ini diikuti pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah baik Pemerintah Daerah maupun pusat dengan mempedomani undangan yang dikirimkan ke masing-masing SKPD, sampai akhir tahun 2015 kegiatan ini secara fisik

terlaksana 100% dengan tingkat capaian keuangan hanya sebesar 51.69%. Rendahnya realisasi capaian keuangan kegiatan ini disebabkan kurangnya pelaksanaan Bimtek sehingga biaya kontribusi dan biaya belanja harian tidak dapat dicairkan sehingga realisasi keuangan kegiatan ini dibawah batas minimal, anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini adalah untuk mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan.

c. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Aparatus Sipil Negara terhadap bidang tugas maka dilakukan Pengembangan terhadap SDM di lingkungan Sekretariat DPRD dengan melakukan studi komparatif ke daerah yang sudah dianggap lebih baik dalam peningkatan pengembangan Sumber Daya Manusia pada akhir tahun Anggaran 2015 kegiatan ini secara fisik terlaksana 100% namun realisasi keuangan hanya sebesar 79.35% Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini karena terjadinya selisih harga tiket ke daerah pelaksanaan kegiatan sehingga dalam realisasi harga tiket dibawah plafon yang dianggarkan sehingga terjadi selisih dalam pelaksanaan kegiatan

d. Pelatihan Kantor Sendiri

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap tugas pokok dan fungsinya, kegiatan ini secara fisik dapat terlaksana 100% dan keuangan terealisasi sebesar 66.66%. Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini karena terjadi penghematan dalam pelaksanaan kegiatan

5. **Pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja ada 2 (dua) kegiatan yang tidak memenuhi target dari 3 (tiga) kegiatan yaitu**

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Kegiatan ini ditujukan untuk menyusun laporan kegiatan yang sudah dilaksanakan, baik laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan, kegiatan ini sampai dengan akhir tahun 2015, secara fisik terlaksana sebesar 100 % diperoleh dengan membandingkan antara realisasi fisik dengan target hasil yang ditetapkan yaitu  $\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$  dengan realisasi keuangan sebesar 67.10 %. Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena rendahnya realisasi belanja cetak dan penjilidan karena laporan akhir tahun belum dijilid dan digandakan karena masih dalam pembenahan sedangkan tanggal 31 Desember Bendahara pengeluaran sudah membuat laporan sehingga realisasi keuangan kegiatan ini tidak mencapai batas minimal yang ditetapkan sedangkan secara fisik kegiatan sudah dilaksanakan sepenuhnya.

b. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun dan menyusun anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya pada dokumen anggaran baik anggaran murni, pergeseran anggaran dan anggaran perubahan, dengan tujuan anggaran dapat tersusun dan terencana sesuai dengan kebutuhan. Sampai akhir tahun 2015 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik sebesar 100% dengan perbandingan antara realisasi fisik dengan target outcome yang ditetapkan yaitu  $\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$  dan realisasi keuangan hanya sebesar 70.79% kurangnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena terkait

dengan biaya foto copy dan penjilidan tidak dicairkan karena anggaran 2016 belum digandakan dan dijilid sehingga realisasi keuangan ini dibawah target yang ditetapkan.

**6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah ada 4 ( empat ) kegiatan yang tidak memenuhi target dari 6 ( enam ) kegiatan yaitu :**

- a. Kegiatan Reses kegiatan ini ditujukan untuk menjemput aspirasi kepada masyarakat dengan melakukan Kunjungan Kerja Kelompok dan Perorangan, kegiatan secara fisik terlaksana 100% namun realisasi keuangan hanya terlaksana sebesar 71.94% ini disebabkan karena tidak semua anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan reses kedaerah pemilihannya masing-masing sehingga menyebabkan realisasi keuangan kegiatan dibawah batas minimum yang ditetapkan.
- b. Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretaris DPRD terhadap bidang tugasnya. Sampai akhir tahun 2015 kegiatan ini secara fisik terlaksana sebesar 100% namun realisasi keuangan hanya mencapai 78.61% rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena kegiatan ini menyangkut dengan Workshop, berhubung tidak semua anggota DPRD yang melaksanakan workshop sehingga menyebabkan rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini.
- c. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan  
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan ini ditujukan untuk mensosialisasikan kegiatan dan Produk-produk DPRD yang dihasilkan selama tahun anggaran 2015, sampai akhir tahun 2015 kegiatan ini secara fisik terlaksana sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar 48.78% rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini karena tidak seluruh Anggota DPRD mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan yang hasilnya untuk disampaikan kepada masyarakat.
- d. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi-Komisi ke Luar Daerah.  
Pelaksanaan kegiatan ini ditujukan untuk melaksanakan tugas-tugas kedewanan dengan melakukan kunjungan kerja ke Luar Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan melihat perkembangan pembangunan di daerah tempat tujuan untuk dapat diterapkan di Daerah Sumatera Barat, sekaligus melakukan studi perbandingan untuk disampaikan kepada Pemerintah Sumatera Barat untuk dapat dijadikan sebagai bahan pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat. Kegiatan ini sampai akhir tahun anggaran 2015, kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan komisi-komisi ke luar daerah realisasi fisiknya mencapai 100 % dengan perbandingan realisasi fisik dengan target hasil yang ditetapkan yaitu  $\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$  dengan realisasi keuangan sebesar 64.60%. Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena efisiensi anggaran dengan menekan pengeluaran dari plafon yang dianggarkan sehingga pengeluaran dibawah palafon anggaran yang disediakan. Sehingga dengan menekan pengeluaran terjadi efisiensi dalam belanja dan realisasi keuangan menjadi rendah.

**7. Program Peningkatan Pelayanan kedinasan,**

Kegiatan terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan penyediaan pelayanan tamu pemerintah daerah, kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik sebesar 95% dan realisasi keuangan sebesar 86.50%

**8. Program Peningkatan Penataan Perundang-Undangan ada 1 (satu) kegiatan yang tidak memenuhi target dari 3 kegiatan yang ada yaitu :**

a. Kegiatan seminar dalam rangka pembahasan Ranperda

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan menghimpun masukan-masukan dari narasumber/dewan pakar dengan mengundang nara sumber melaksanakan seminar untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas di dewan, sampai akhir tahun 2015 secara fisik kegiatan seminar dalam rangka pembahasan Ranperda terlaksana sebesar 100% dengan realisasi keuangan mencapai 49.62 %. Rendahnya realisasi keuangan kegiatan disebabkan karena efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan dengan menekan biaya makan minum pelaksanaan kegiatan disatukan dengan biaya rapat-rapat yang dilaksanakan oleh DPRD sehingga biaya makan minum dapat ditekan dalam pelaksanaan kegiatan.

**9. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media**

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, kegiatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan hasil-hasil pembangunan yang terlaksana di Sumatera Barat dengan bekerjasama dengan Mas Media, sampai makhir tahun 2015 kegiatan ini secara fisik terlaksana sebesar 95% dengan realisasi keuangan sebesar 82.86% rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

**10 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi, kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap Sumber Daya Komunikasi dengan melakukan kerjasama dengan Kab./kota, kegiatan ini sampai akhir tahun 2015 secara fisik terlaksana sebesar 100% dan realisasi keuangan terlaksana sebesar 59.03%. Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan yang memenuhi target dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dari 17 ( tujuh belas ) kegiatan ada 13 kegiatan yang memenuhi target yang ditetapkan baik fisik maupun keuangan dengan rincian :**

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan jasa surat menyurat adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan surat masuk dan surat keluar. Selama Tahun 2015, secara fisik kegiatan pengelolaan surat menyurat terlaksana sebesar 100 % dengan realisasi keuangan sebesar 95.27%.

Presentase fisik diperoleh dari hasil realisasi dibandingkan dengan Target Outcome yaitu  $\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik adalah kegiatan yang berhubungan dengan jasa komunikasi, air dan listrik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedewanan dan kesekretariatan DPRD Provinsi Sumatera Barat, sampai akhir tahun 2015, secara fisik kegiatan penyediaan jasa telekomunikasi, sumber daya air dan listrik dapat terlaksana sebesar 100% Realisasi fisik didapat dari realiasi dibandingkan dengan target outcome/hasil yang ditetapkan yaitu  $\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$  dengan realisasi keuangan sebesar 93.31%,

c. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Kegiatan jasa jaminan barang milik daerah, adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk pembayaran pajak bumi dan bangunan terhadap Rumah Dinas dan Mess DPRD dan asuransi kendaraan dinas DPRD. Sampai dengan akhir tahun 2015, secara fisik kegiatan penyediaan jaminan barang milik daerah dapat dilaksanakan sebesar 100% Realisasi fisik diperoleh dengan membandingkan antara realisasi fisik dengan target outcome/hasil yaitu  $\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$  dengan realisasi keuangan sebesar 85.15%.

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor adalah kegiatan untuk pemeliharaan kebersihan kantor, dengan tujuan agar anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Sumbang dapat bekerja dengan tenang dan nyaman. Sampai dengan akhir tahun 2015, secara fisik kegiatan dapat dilaksanakan secara keseluruhan dengan realisasi sebesar 100% Realisasi fisik diperoleh dengan membandingkan antara realisasi fisik dengan target outcome/hasil yaitu  $\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$  dan realisasi keuangan sebesar 94.73 %.

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan penyediaan alat tulis kantor adalah kegiatan penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedewanan dan kesekretariatan DPRD. Sampai akhir tahun 2015, secara fisik kegiatan dapat dilaksanakan sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar 96.70 %. Realisasi fisik diperoleh dari realiasi fisik dibandingkan dengan target outcome/hasil yaitu  $\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$ ,

f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan Barang cetakan dan Penggandaan ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk mencetak dan menggandakan hasil kegiatan tahun 2015. Sampai akhir tahun 2015 kegiatan secara fisik terlaksana sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar 88.56%

g. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan dukungan untuk penyelenggaraan penerangan listrik di kantor DPRD. Sampai akhir tahun 2015, secara fisik kegiatan dapat dilaksanakan sebesar 100%

dengan realisasi keuangan sebesar 88.50 %. Realisasi fisik yaitu  $\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$ .

h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, adalah kegiatan yang bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedewanan, sampai dengan akhir tahun 2015, secara fisik kegiatan dapat dilaksanakan sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar 91.45%. Realisasi fisik diperoleh yaitu dengan membandingkan target capaian dengan target hasil yaitu  $\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$ .

i. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat ditujukan untuk memenuhi kebutuhan peralatan rumah tangga keperluan kantor untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kedewanan. Sampai akhir tahun 2015, secara fisik kegiatan ini dapat terlaksana sebesar 100% yaitu dengan membandingkan realisasi fisik dengan target hasil yaitu  $\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$  dengan realisasi keuangan juga sebesar 92.41%.

j. Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan penyediaan makanan dan minuman sarannya adalah tersedianya makanan dan minuman untuk mendukung penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan, dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dengan memberikan pelayanan kepada DPRD dalam rangka melaksanakan rapat-rapat sebagai salah satu tugas pokok DPRD dalam pelaksanaan pemerintahan. Sampai akhir tahun 2015 secara fisik kegiatan ini terlaksana sebesar 100% dengan perbandingan realisasi fisik dengan target hasil/outcome  $\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$  dengan realisasi keuangan sebesar 99,99%.

k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah

Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah, adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan dukungan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD. Sampai dengan akhir tahun 2015, kegiatan ini secara fisik terlaksana sebesar 100% dengan perbandingan antara realisasi fisik dengan target hasil yaitu  $\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$  dengan realisasi keuangan sebesar 97.47%.

l. Penyediaan Jasa Sopir

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan tenaga sopir untuk kelancaran tugas-tugas Sekretariat DPRD, sampai akhir tahun 2015 kegiatan terlaksana secara fisik sebesar 100% dan Realisasi keuangan sebesar 100%

m. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Kegiatan penyediaan jasa pengamanan kantor adalah kegiatan yang ditujukan untuk melaksanakan pengamanan baik dirumah dinas maupun pada Kantor DPRD pada malam hari maupun pada siang hari dengan tujuan memberikan pengamanan kepada dewan dalam melaksanakan tugas pokok kedewanan. Sampai dengan akhir tahun 2015, kegiatan ini terlaksana dengan persentase fisik sebesar 100% yaitu perbandingan antara realisasi fisik

dengan target hasil yang ditetapkan yaitu  $\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$  dan realisasi keuangan sebesar 87.55 %.

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dari 16 kegiatan hanya 11 kegiatan yang memenuhi target yang ditetapkan diantaranya :**

a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional adalah kegiatan dalam bentuk pengadaan kendaraan dinas/operasional untuk Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat berupa pengadaan Kendaraan bus 3/4 dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada DPRD, dengan tersedianya kebutuhan kendaraan dinas pelayanan kepada DPRD terlaksana secara optimal sehingga apa yang diperlukan dalam melaksanakan tugas-ugas DPRD dapat dilayani dengan baik, sampai akhir tahun 2015 kegiatan ini terlaksana secara fisik sebesar 100%. dan realisasi keuangan sebesar 99,83 %, prosentase realisasi fisik diperoleh dengan membandingkan realisasi fisik dengan target hasil yang ditetapkan yaitu  $\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$ , tingginya realisasi kegiatan ini disebabkan karena kegiatan ini dapat terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan.

b. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas/Mess

Kegiatan pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas/mess adalah kegiatan dalam bentuk pengadaan belanja peralatan/perlengkapan rumah tangga pakai habis, pengadaan peralatan dan perlengkapan pakai habis, pengadaan alas meja, tanaman hias, pering makan, tempat beras, jemuran handuk dan lain sebagainya, pengadaan belanja modal meja makan, kursi future, pengadaan tempat tidur, kamar set, meja rias, pengadaan alat pembersih ( mesin cuci ) dan pengadaan meja dinding dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan peralatan rumah jabatan DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka melaksanakan tugas pokok Sekretariat DPRD dengan memberikan pelayanan kepada DPRD. Sampai akhir tahun 2015 realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100 % dengan realisasi keuangan 88.29%. Prosentase fisik kegiatan ini didapat dengan membandingkan antara realisasi fisik dengan target hasil yang ditetapkan yaitu  $\frac{100}{100} \times 100\%$ , tingginya realisasi fisik dan keuangan kegiatan ini karena kegiatan ini dapat terlaksana sesuai waktu yang ditetapkan..

c. Pengadaan Meubeleur

Kegiatan pengadaan meubeleur ini adalah kegiatan untuk pengadaan BM. Pengadaan lemari penyimpanan/loker, pengadaan Meja Rapat, Pengadaan Kursi Rapat, pengadaan Lemari buku dan pengadaan meja komputer, kegiatan ini bertujuan untuk menyimpan arsip-arsip yang tidak terpakai yang masih diperlukan untuk pemeriksaan, pengadaan meja komputer adalah untuk keperluan komputer Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini sampai akhir tahun 2015 terealisasi secara fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar 88.27%, realisasi fisik diperoleh dengan membandingkan antara fisik dengan target yang ditetapkan yaitu  $\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$ , kegiatan ini memenuhi target batas minimal yang ditetapkan, tercapainya realisasi dari kegiatan ini karena Sekrt.DPRD sudah

melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang ditetapkan,

- d. **Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi**  
Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan komputer kebutuhan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sampai akhir tahun 2015 kegiatan terlaksana secara fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95.60%
- e. **Pengadaan Peralatan studio, alat komunikasi dan alat informasi**  
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan atas pelaksanaan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh dewan dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi dan budgeting dengan menyediakan peralatan yang mendukung kegiatan dewan dimaksud seperti menyediakan pengadaan Televisi, Mic Conference, alat perekam. Sampai akhir tahun anggaran 2015 kegiatan ini terlaksana secara fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94.31%, kegiatan mencapai batas minimal yang ditetapkan, tercapainya kegiatan karena Sekrt.DPRD telah melaksanakan kegiatan sesuai program yang direncanakan.
- f. **Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor**  
Pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sasaran kinerjanya adalah terpeliharanya gedung kantor selama satu tahun anggaran, dengan menyediakan peralatan bahan pakai habis dan perbaikan wc, perbaikan pintu-pintu, pemeliharaan pagar, perbaikan perkarangan/taman dan lainnya agar gedung kantor DPRD dapat terpelihara dengan baik, sehingga Dewan dan Sekretariat DPRD dapat melaksanakan tugas dengan aman dan nyaman, sampai akhir tahun 2015 secara fisik kegiatan ini mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar 92.02%.
- g. **Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan**  
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemeliharaan terhadap mobil jabatan di Sekretariat DPRD sampai akhir tahun Anggaran 2015 kegiatan ini terlaksana secara fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94.27
- h. **Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional**  
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sasaran kinerjanya adalah terlaksananya pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/operasional DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekrt.DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas DPRD. Sampai akhir tahun 2015 secara fisik kegiatan ini terlaksana 100%, dengan realisasi keuangan sebesar 91.10 %.
- i. **Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess**  
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemeliharaan terhadap peralatan dan perlengkapan rumah jabatan agar peralatan dan perlengkapan dapat terjaga dengan baik kegiatan ini sampai akhir tahun 2015 secara fisik terlaksana sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96.68
- j. **Pemeliharaan Rutin/berkala Komputer dan jaringan komputerisasi**  
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap computer dan laptop dan jaringan serta perangkatnya yang ada dikantor guna untuk mendukung kelancaran tugas-

tugas yang dilakukan di Sekretariat DPRD. Sampai akhir tahun 2015 kegiatan ini secara fisik tercapai 100% dan realisasi keuangan terlaksana sebesar 91.08%.

k. **Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD**

Kegiatan ini ditujukan agar aset yang ada di DPRD dapat dikelola dengan baik, diawasi dan dikendalikan secara baik, dengan adanya kegiatan ini aset-aset yang tidak perlu dilakukan pemeliharaan dapat diusulkan untuk dihapuskan dengan tujuan tidak terjadi penumpukan aset-aset yang tidak berguna. Sampai akhir tahun 2015 secara fisik kegiatan ini terlaksana 100% dengan perbandingan antara realisasi fisik dengan target hasil yaitu  $\frac{100}{100} \times 100$  dengan realisasi keuangan sebesar 93.60%.

**3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur hanya 1 ( satu ) kegiatan yaitu :**

Semula Program ini terdiri dua kegiatan yaitu Pengadaan Pakain dinas dan kelengkapannya dan kegiatan Pelantikan Gubernur namun pada perubahan anggaran program ini hanya tinggal 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Pengadaan Pakaian dinas dan kelengkapannya dan kegiatan Pelantikan Gubernur di drop karena pelantikan Gubernur tidak jadi dilaksanakan di DPRD Provinsi Sumatera Barat

a. **Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya**

Kegiatan pengadaan pakaian dinas PNS/PH dan Anggota DPRD adalah kegiatan untuk meningkatkan disiplin aparatur dan pejabat negara dalam melaksanakan tugas kedinasan baik bagi PNS maupun Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, kegiatan ini dalam bentuk pengadaan pakaian dinas PNS/PH dan Anggota DPRD. Secara fisik sampai akhir tahun anggaran 2015 kegiatan ini terlaksana 100% dengan perbandingan realisasi fisik dengan target hasil yang ditetapkan yaitu  $\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$  dengan penyerapan anggaran sebesar 98.54%. Berhasilnya kegiatan ini sesuai dengan target yang ditetapkan karena kebutuhan akan pakaian untuk menunjang kegiatan kedinasan.

**4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan dari 3 ( tiga ) kegiatan hanya satu kegiatan yang memenuhi target yaitu :**

a. **Penata Usahaan Keuangan SKPD**

Kegiatan penataan usahan keuangan SKPD ini bertujuan untuk menata dan menyusun pelaksanaan kegiatan keuangan SKPD di Sekretariat DPRD dengan baik dari awal pelaksanaan kegiatan sampai berakhirnya kegiatan pada tahun anggaran bersangkutan. Kegiatan ini sampai akhir tahun 2015 terlaksana 100 % yaitu dengan membandingkan capaian realisasi fisik dengan target hasil yang ditetapkan dengan perbandingan  $\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$  dengan realisasi keuangan sebesar 91.83%.

**5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dari 6 kegiatan hanya 2 ( dua ) kegiatan memenuhi target yaitu :**

a. **Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.**

Untuk kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah, pada tahun 2015 ditargetkan pembahasan terhadap Ranperda sebanyak 24 buah Dari pelaksanaan kegiatan tersebut,

sampai dengan akhir tahun 2015 realisasi fisik mencapai sebesar 90 % dengan realisasi keuangan sebesar 88,87%.

- b. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah.

Kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah dilaksanakan setiap bulan, sampai akhir tahun 2015 realisasi fisik kegiatan terlaksana sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93.89%

**7. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan 1 ( satu ) kegiatan memenuhi target yang ditetapkan yaitu**

Penyediaan Jasa Pelayanan tamu Pemerintah Daerah

Kegiatan penyediaan jasa pelayanan tamu pemerintah daerah ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada DPRD dengan memfasilitasi tamu-tamu Pimpinan dan anggota DPRD serta tamu Sekretariat DPRD dengan menyediakan makanan dan minuman tamu-tamu. Secara fisik selama tahun 2015 pelaksanaan kegiatan ini mencapai sebesar 95 % dengan realisasi keuangan 86.50%.

**8. Program Peningkatan Penataan Perundang-Undangan dari 3 ( tiga ) kegiatan ada 2 ( dua ) kegiatan yang memenuhi target yaitu :**

- a. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang Undangan

Kegiatan koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dalam bentuk konsultasi dan koordinasi terhadap permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi DPRD sampai akhir tahun 2015 secara fisik realisasinya mencapai 100% yaitu perbandingan antara realisasi fisik dengan target hasil yang ditetapkan  $\frac{100}{100} \times 100 \% = 100\%$  dan realisasi keuangan sebesar 93.48 %.

- b. Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang Undangan Yang Lebih Tinggi, Keserasian Peraturan Perundang Undangan.

Kegiatan kajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan ini bertujuan untuk mensinkronkan peraturan yang telah ditetapkan dengan peraturan yang lebih tinggi, apakah Peraturan Daerah ataupun peraturan yang ditetapkan dengan bentuk keputusan DPRD tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, pada tahun 2015 kajian disinkronisasikan dengan Peraturan –peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Secara fisik realisasi kegiatan mencapai 100% dengan perbandingan antara realisasi fisik dengan target outcome  $\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$  dengan realisasi keuangan sebesar 95.09%.

**9. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media 1 ( satu ) kegiatan yaitu kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah**

Program ini pada tahun 2015 terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu

Kegiatan Penyebar luasan Informasi Pembangunan Daerah kegiatan ini bertujuan untuk menginformasikan seluruh produk-produk yang dihasilkan oleh DPRD melalui kerjasama dengan Mass Media dengan tujuan seluruh lapisan masyarakat Sumatera Barat dapat mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai oleh Sumatera Barat yang dilakukan oleh DPRD

Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2015 kegiatan ini secara fisik terelisasi hanya sebesar 95 % dan realisasi keuangan hanya sebesar 82.82%.dibawah target yang diharapkan

**10. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**

Program ini ada satu kegiatan yaitu kegiatan pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan informasi kegiatan ini hanya kegiatan fisik yang memenuhi target kegiatan keuangan hanya terlaksana sebesar 59.03% dibawah target yang diharapkan.

Dari Pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat seperti yang telah diinformasikan di atas ada yang memenuhi target ada yang tidak memenuhi target disebabkan karena belum terencananya program dan kegiatan dengan baik sehingga belum dapat terealisasi sesuai dengan yang diharapkan.

Akibat yang timbul dari program-program yang tidak memenuhi target mengakibatkan sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra tidak tercapai dan rencana yang sudah ditetapkan dalam Renstra tidak dapat terlaksana dengan baik dan perencanaan yang sudah ditetapkan menjadi sia-sia. Untuk mengantisipasi hal tersebut kedepan perlu kehatian-hatian dalam menyusun Rencana dan apabila dirasa tidak mungkin dapat terlaksana alangkah baiknya program dan kegiatan tersebut tidak dimunculkan dalam Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Untuk melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat dilihat dalam Tabel T.VI.C .5 Pada tabel T.VI.C 5 masing-masing kegiatan sudah dicantumkan target dari masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015.

TABEL T.VI.C.5

REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2015

PROVINSI SUMATERA BARAT

NAMA SKPD : SEKRETARIAT DPRD

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD TAHUN 2016	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DARI KEGIATAN TAHUN 2015			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2016)					
					TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN	TARGET CAPAIAN				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10	11				
1	20													
1	20	04												
1	20	04	01											
1	20	04	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat yang tepat sasaran	6000	24000	6000	6000	100%	6000	6000 surat untuk 1 tahun	6000 surat untuk 1 thn

1	20	04	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 tahun	4	16	4	4	100%	4	4 unit RD	4 unit RD
1	20	04	01	03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tesedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	4 paket	3 unit almari, 1 unit Ac Central, 8 Unit dispencer, 12 bh automatic aerosol, 1 paket audio visual running tect, 1 unit genset dan 3 unit lemari buku	3 unit almari, 8 Unit dispencer, 12 bh automatic aerosol, 1 paket audio visual running tect, 1 unit genset dan 3 unit lemari buku	100%	3 unit almari, 1 unit AC central chiller, dispenser 8 unit	3 unit almari, 1 unit AC central chiller, dispenser 8 unit	3 unit almari, 1 unit AC central chiller, dispenser 8 unit
1	20	04	01	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Jasa Asuranasi Kendaraan Dinas	68 unit	204 unit	68 unit	68 unit	100%	68 unit	68 unit	68 unit
1	20	04	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 tahun	4 tahun	1 thn	1 thn	100%	1 thn	1 thn	1 thn
1	20	04	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedia Alat tulis kantor	1 tahun	4 tahun	1 thn	1 thn	100%	1 thn	1 thn	1 thn
1	20	04	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 tahun	4 tahun	1 thn	1 thn	100%	1 thn	1 thn	1 thn
1	20	04	01	12	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	1 tahun	4 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 unit gedung kantor	1 unit gedung kantor
1	20	04	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan rumah tangga	1 paket	4 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	1 paket

1	20	04	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedia bahan bacaan	1 tahun	4 tahun	surat kabar 1 tahun	surat kabar 12 bulan/ 1 tahun	100%	1 tahun	1tahun	1 tahun
1	20	04	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan dan minuman	1 tahun	4 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	1 tahun
1	20	04	01	18	Rapat-rapat Koordnasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Laporan konsultasi	Laporan konsultasi	Laporan konsultasi	Laporan konsultasi	100%	124 kali	256	256
1	20	04	01	22	Penyediaan Jasa Tenaga Sopir	Tersedianya Jasa Sopir	1 tahun	2 tahun	Honor sopir outshoshing 5 org	Honor sopir outshoshing 5 org	100%	1 tahun	Honor Tenaga sopir outshorsing 5 org	Honor Tenaga sopir outshorsing 5 org
1	20	04	01	24	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedia Jasa Pengaman Kantor	1 tahun	4 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	12 bln
1	20	04	01	26	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Terselenggara nya pembinaan fisik dan mental aparatur	1 tahun	4 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	12 bln
1	20	04	.01	31	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan dan Pengobatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Terpeliharanya Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga	260 org	520 org	260 org	260 org	0%	260 org	260 org	260 org
1	20	04	01	27	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip	Tertata Dokumen dengan baik	1 tahun	4 tahun	1 tahun	1 tahun	95%	1 tahun	1 thn	1 thn
1	20	04	02		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>									

1	20	04	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedia Gedung Kantor	1 unit	1 unit	1 unit			1 unit	1 unit Gdg. Kantor	1 unit Gdg. Kantor
1	20	04	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Operasional DPRD	2 Unit Kendaraan roda 4	6 unit sepeda motor dan 6 unit klend. Roda empat	2 unit kendaraan roda 4	6 unit sepeda motor dan 6 unit klend. Roda empat	100%	2 unit kend.roda 4	2 unit kendaraan roda 4	2 unit kendaraan roda 4
1	20	04	02	06	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya kebutuhan akan perlengkapan rumah jabatan	1 paket	4 paket	1 paket peralatan rumah jabatan	1 unit rumah jabatan	100%	1 paket	1 paket	1 paket
1	20	04	02	10	Pengadaan Meubeleur	Tersedianya meubeleur keperluan kantor	1 paket	4 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	1 paket
1	20	04	02	15	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Tersedianya komputer dan jaringan	1 paket	12 unit PC, 5 unit Laptop, 8 printer 12 bh hardis eksternal 3 unit layer poyektor 4 unir scanner	12 unit PC, 5 unit Laptop, 8 printer 12 bh hardis eksternal 3 unit layer poyektor 4 unir scanner	12 unit PC, 5 unit Laptop, 8 printer 12 bh hardis eksternal 3 unit layer poyektor 4 unir scanner	100%	1 paket	1 paket	1 paket
1	20	04	02	16	Pengadaan Alat Studio, alat komunikasi dan alat informasi	Tersedia alat studio dan alat komunikasi	1 paket	7 unit kamera, 4 unit TV LED 1 unit Divair CCTV	7 unit kamera, 4 unit TV LED 1 unit Divair CCTV	7 unit kamera, 4 unit TV LED 1 unit Divair CCTV	100%	1 paket	1 paket	1 paket
1	20	04	02	19	Pemeliharaan rutin / berkala alat studio, alat komunikasi dan alat informasi	Terlaksananya pemeliharaan alat studio	1 tahun	4 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 thn	1 thn

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

1	20	04	02	20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan	3 unit rumah jabatan/dinas/mess	1 unit rumah jabatan/dinas	1 unit rumah jabatan/dinas	1 unit rumah jabatan/dinas	100%	3 unit jabata / dinas	1 unit rumah jabatan dan 1 unit mess	1 unit rumah jabatan/dinas
1	20	04	02	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor DPRD Prov. Sumbar	1 tahun	4 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	12 bln	12 bln
1	20	04	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan	5 unit	20 unit	5 unit	5 unit	100%	5 unit	5 unit	5 unit
1	20	04	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	64 unit	201 unit	64 unit	60 unit	100%	53 unit mobil , 11 unit sepeda motor	53 unit mobil, 11 sepeda motor	53 unit mobil, 11 sepeda motor
1	20	04	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Terpeliharanya peralatan/perlengkapan rumah jabatan/dinas	1 tahun	4 tahun	1 tahun	1 tahun	90%	1 tahun	1 tahun	1 tahun
1	20	04	02	25	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	4 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	1 tahun
1	20	04	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelaur	Terlaksananya pemeliharaan meubeleur	1 tahun	4 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	1 tahun
1	20	04	02	27	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi	Terlaksanananya pemeliharaan komputer dan jaringan	1 tahun	4 tahun	1 tahun	1 tahun	<b>100%</b>	<b>1 tahun</b>	<b>1 tahun</b>	<b>1 tahun</b>
1	20	04	02	28	Pemeliharaan Rutin / berkala instalasi dan jaringan	Terpeliharanya instalasi dan jaringan	1 paket	4 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	1 paket

1	20	04	02	29	Pengelolaan , Pengawasan asset SKPD	Terpeliharanya a aset SKPD	1 tahun	4 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	1 tahun
1	20	04	03		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DISIPLIN APARATUR</b>									
1	20	04	03	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi PNS/PH dan Anggota DPRD	419 stel	914 stel	419 stel	595 stel	100%	419 stel	419 stel	419 stel
1	20	04	05		<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>									
1	20	04	05	01	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan perundang- undangan	30 org	51 org	30 org	12	100%	30 org	30 org	30 org
1	20	04	05	02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Terlaksananya bimbingan teknis bagi aparatur	24 org	66 org	10	8	100%	24 org	24 org	24 org
1	20	04	05	03	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)	Terlaksananya Pengembanga n SDM	41 org	212 org	57	57	100%	41 org	41 org	41 org
1	20	04	05	06	Pelatihan Kantor Sendiri	Terlaksananya Pelatihan Kantor	50 org	50 org	50 org	50 org	100%	50 org	50 org	50 org
1	20	04	06		<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>									

1	20	04	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan keuangan SKPD	Laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan	95%	Laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan	Laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan	Laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan			
1	20	04	06	03	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terlaksananya perencanaan anggaran DPRD dan Set. DPRD yang baik	RKA, DPA, DPA Pergeseran, DPPA	100%	RKA, DPA, DPA Pergeseran, DPPA	RKA, DPA, DPA Pergeseran, DPPA	RKA, DPA, DPA Pergeseran, DPPA			
1	20	04	06	05	Penatausahaan Keuangan SKPD	Terbayarkanya honor bagi pengelola keuangan	1 thn	4 thn	1 thn	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	1 tahun
1	20	04	15		<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>									
1	20	04	15	01	Pembahasan Rancangan Perda	Terlaksananya pembahasan rancangan Perda/Keputusan DPRD	19 Ranperda	57 perda	24 Perda /keputusan DPRD	13 Perda	90%	19 Ranperda	19 Perda/Keputusan DPRD	19 Perda/Keputusan DPRD
1	20	04	15	02	Reses	Tertampungnya aspirasi masyarakat pada 19 kab/kota	19 Kab/kota	1 reses kelompok, 2 reses perorangan	1 reses kelompok, 2 reses perorangan	1 reses kelompok, 2 reses perorangan	100%	1 reses kelompok, 2 reses perorangan	1 reses kelompok, 2 reses perorangan	1 reses kelompok, 2 reses perorangan
1	20	04	15	03	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Terselenggaranya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	12 kegiatan	48 kegiatan	12 keg	12 keg	100%	12 keg	12 keg	12 keg
1	20	04	15	04	Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD	Studi komparatif, studi banding dan workshop	65 org	230 org	65 org	65 org	100%	65 org	65 org	65 org

1	20	04	15	05	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	45 org	129 org	30 org	28 org	100%	45 org	45 org	45 org
1	20	04	15	06	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi ke luar Daerah	Terselegranya kunjungan Pimpinan dan komisi ke luar daerah	22 kali	31 kali	15 kali	3 kali	100%	22 kali	22kali	22kali
1	20	04	15	07	Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah	Tersedia jasa Pelayanan Tamu	1 paket	4 paket	1 paket	1 paket	95%	1 paket	1 paket	1 paket
1	20	04	15	08	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	5 kali	20 kali	5 kali	5 kali	100%	5 kali	5 kali	5 kali
1	20	04	15	09	Kajian Peraturan Perundang-undang Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, keserasian peraturan perundang-undangan	Terlaksananya kajian peraturan perundang-undangan	4 kali	10 kali	2 kali	2 kali	100%	4 kali	4 kali	4 kali
1	20	04	15	10	Seminar dalam Rangka Pembahasan Ranperda	Terlaksananya legislasi rancangan Perda	5 kali	10 kali	1 kali	1 kali	100%	5 kali	5 kali	5 kali
1	20	04	15	11	Penyebarluasan informasi pmbangunan daerah	Tersedianya dokumen Informasi Pembangunan Daerah	1 paket	4 paket	1 paket	1 paket	95%	1 paket	1 paket	1 paket
1	20	04	15	12	Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi	Tersedianya pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	1 paket	4 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	1 paket



Untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2016 dengan jumlah Program sebanyak 6 program dan kegiatan sebanyak 54 (lima puluh empat) kegiatan dengan rincian Program dan kegiatan sebagai berikut :

**I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 17 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Peralatan rumah tangga
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11. Penyediaan Makanan dan minuman
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
13. Penyediaan Jasa sopir kantor
14. Penyediaan Jasa Pengaman kantor
15. Penyediaan jasa pembinaan mental dan fisik aparatur
16. Pengelolaan dan Pendataan dokumen arsip SKPD
17. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan pengobatan Pimpinan dan Anggota

Untuk tahun 2016 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat berusaha melaksanakan masing-masing kegiatan mencapai 90% dengan mempedomani aliran kas masing-masing kegiatan dalam DPA Tahun 2016.

**II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 17 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :**

1. Pembangunan Gedung Kantor
2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
3. Pengadaan Peralatan rumah jabatan/Dinas
4. Pengadaan Meubeleur
5. Pengadaan Komputer dan jaringan komputerisasi
6. Pengadaan peralatan studio, komunikasi dan informasi
7. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan studio, komunikasi dan informasi
8. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
9. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
10. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
11. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional
12. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan rumah jabatan
13. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

14. Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur
15. Pemeliharaan rutin/berkala computer dan jaringan komputerisasi
16. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi dan jaringan
17. Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian asset

Sesuai dengan DPA dan aliran kas masing-masing kegiatan dalam DPA Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, Sekretariat DPRD berkomitmen akan melaksanakan masing-masing kegiatan mencapai 90% dengan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur satu kegiatan dengan rincian sebagai berikut :**

Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Sekretariat DPRD akan melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan aliran kas dalam DPA dengan capaian kegiatan diatas 90%

**IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan 4 (empat) kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :**

- 1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- 2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 3 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
- 4 Pelatihan Kantor Sendiri

Berdasarkan DPA dan aliran kas untuk tahun 2016 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat akan melaksanakan masing-masing kegiatan dengan capaian kegiatan sebesar 90%

**V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan 3 (tiga) kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :**

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
3. Penatausahaan Keuangan SKPD

Sesuai dengan DPA dan aliran kas pada masing-masing kegiatan ini Sekretariat DPRD berusaha melaksanakan kegiatan mencapai 90%

**VI. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan 12 (dua belas) kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :**

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
2. Reses
3. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah
4. Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota dan Sekeretaris DPRD
5. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
6. Kunjungan Kerja Pimpinan dan komisi ke luar daerah
7. Penyediaan jasa pelayanan tamu
8. Koordinasi Kerjsama permasalahan peraturan perundang-undangan
9. Kajian Peraturan Perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
10. Seminar dalam rangka pembahasan Ranperda
11. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
12. Pembinaan dan pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informasi

Berdasarkan DPA dan aliran kas pada program dan kegiatan ini Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat akan melaksanakan capaian kegiatan diatas 85%

Untuk Program dan Kegiatan tahun 2017 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk melaksanakannya seoptimal mungkin dengan capaian kinerja masing –masing program dan kegiatan perkiraan mencapai 90%, dengan batas minimal 85 % sesuai dengan perjanjian kinerja Kepala SKPD dengan Gubernur Sumatera Barat, Kegagalan Sekretariat DPRD melaksanakan program dan kegiatan dibawah 85% maka Sekretariat DPRD dianggap belum mampu mengemban amanah yang telah disepakati dan selayaknya mendapat teguran/punishman dari Kepala Daerah sebagai pemberi amanah, untuk tidak terjadi hal yang demikian maka Sekretariat DPRD akan berusaha menjalankan amanah dengan melaksanakan program dan kegiatan yang sudah dtuangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dengan berkaca pada pelaksanaan kegiatan pada tahun 2015 Sekertariat DPRD masih ada yang belum memenuhi target baik fisik maupun keuangan maka untuk tahun 2016 Sekretariat DPRD memfokuskan pada kegiatan-kegiatan yang belum mencapai target yang ditetapkan dengan tujuan supaya kegiatan-kegiatan yang belum mencapai target pada tahun 2015 dapat memenuhi target baik fisik maupun keuangan dengan artian tidak memperhatikan program dan kegiatan yang telah memenuhi harapan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pembahasan Rencana Kerja Tahun 2017 di Ruang Rapat Sosial Budaya Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada hari Senin tanggal 4 April 2016 dapat kami jelaskan bahwa kegiatan yang belum mencapai target menurut hemat kami masih layak untuk dilaksanakan karena kegiatan ini menyangkut pelayanan kepada DPRD, kalau tidak dilaksanakan dan dianggarkan kegiatan yang belum mencapai target yang diharapkan bisa saja tidak dilaksanakan/dianggarkan tapi kalau kegiatan menurut Dewan masih layak untuk dianggarkan maka kita tidak bisa menghilangkan atau tidak menganggarkannya pada tahun berikutnya.

Untuk Capaian target Renstra Sekretariat DPRD dengan realisasi Rencana Kerja tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel T.VI.C.1, pada tabel tersebut dapat dilihat capaian target Renstra dengan Realisasi Rencana Kerja tahun sebelumnya, pada tabel ini Sekretariat DPRD menampilkan target Renstra Tahun 2015 dengan reaisasi tahun 2015 dan perkiraan capaian pada tahun 2016.

TABEL T.VI.C 1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD :  
 SEKRETARIAT DPRD  
 PROVINSI SUMATERA  
 BARAT

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK (PP 6/2008)	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2014 (thn n - 2)	TAHUN 2015 (thn n - 1)	TAHUN 2016 (thn n )	TAHUN 2017 (thn n + 1)	TAHUN 2014 (thn n - 2)	%	TAHUN 2015 (thn n - 1)	%	TAHUN 2016 (thn n )	TAHUN 2017 (thn n + 1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>13.454.945.119</b>	<b>10.402.603.492</b>	<b>11.573.315.600</b>	<b>16.336.563.757</b>	<b>12.104.598.710</b>	<b>90</b>	<b>9.836.791.234</b>	<b>94,56</b>	<b>11.573.315.600</b>	<b>16.336.563.757</b>	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			771.713.023	786.521.034	786.521.000	1.192.814.000	750.142.000	97,2	786.521.034	100,00	786.521.000	1.192.814.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik			1.307.979.996	1.297.979.988	1.297.979.000	1.741.740.000	1.043.872.414	79,8	1.157.400.000	89,17	1.297.979.000	1.741.740.000	
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah			103.400.000	240.000.000	240.000.000	307.950.000	79.985.167	77,4	237.000.450	99	240.000.000	307.950.000	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			654.875.000	531.400.000	773.927.000	710.701.725	629.020.999	96,1	530.400.000	99,81	773.927.000	710.701.725	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor			323.016.600	254.084.050	271.814.000	313.284.250	311.360.250	96,4	253.850.000	99,91	271.814.000	313.284.250	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			665.932.000	302.315.000	300.000.000	370.745.000	372.957.600	56,0	301.456.000	99,72	300.000.000	370.745.000	
7	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			61.451.600	64.570.000	79.442.400	79.442.300	58.336.800	94,9	63.475.000	98,30	79.442.400	79.442.300	

8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.873.725.000	1.512.255.000	2.700.000.000	2.874.420.000	2.561.843.000	89,1	1.512.245.750	100,00	2.700.000.000	676.520.000	
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			57.580.000	133.590.000	133.500.000	226.900.000	57.580.000	100,0	133.575.000	99,99	133.500.000	226.900.000	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			579.610.000	564.889.000	616.014.700	657.308.000	480.193.200	82,8	564.800.000	99,98	616.014.700	657.308.000	
11	Penyediaan Makanan dan Minuman			850.090.000	626.564.000	900.542.500	590.985.000	849.010.800	99,9	625.390.000	99,81	900.542.500	590.985.000	
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah			1.711.260.000	2.407.148.000	2.478.670.000	5.426.552.000	1.707.292.880	99,8	2.400.950.000	99,74	2.478.670.000	5.426.552.000	
13	Penyediaan Jasa Sopir				442.000.000	442.000.000	305.232.700			440.000.000	99,55	442.000.000	305.232.700	
14	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor			360.195.000	500.755.000	500.755.000	717.395.282	358.064.000	99,4	500.733.000	100,00	500.755.000	717.395.282	
15	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur			34.400.000	52.150.000	52.150.000	57.150.000	21.200.000	61,6	49.500.000	94,92	52.150.000	57.150.000	
16	Pengelolaan dan Pendataan Dokumen Arsip			274.374.400	286.382.420	-	374.143.000	150.482.600	54,8	279.495.000	97,60	-	374.143.000	
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan dan pengobatan Pimpinan dan Anggota DPRD			2.825.342.500	400.000.000		390.000.000	2.673.257.000	94,6	-	-		390.000.000	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>7.829.881.465</b>	<b>21.186.433.400</b>	<b>16.409.280.000</b>	<b>23.714.557.119</b>	<b>7.048.168.820</b>	<b>90,0</b>	<b>6.000.693.730</b>	<b>28,32</b>	<b>16.409.280.000</b>	<b>24.079.013.525</b>	

	Pembangunan Gedung Kantor				15.000.000.000	10.000.000.000	16.000.000.000			14.575.000.000	<b>97,17</b>	10.000.000.000	<b>16.000.000.000</b>	
17	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		1.355.330.000	164.200.000	600.000.000	598.150.000	1.354.612.700	99,9	164.000.000	99,88	600.000.000	46.000.000		
18	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas		340.377.120	494.187.000	640.000.000	640.000.000	326.797.350	96,0	493000000	99,76	640.000.000	534.500.000		
19	Pengadaan Mebeleur		164.600.000	474.155.000	400.000.000	213.500.000	145.965.000	88,7	473.275.000	99,81	400.000.000	147.500.000		
20	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi		378.850.000	214.267.500	214.000.000	177.368.750	230.295.000	60,8	212.750.000	99,29	214.000.000	632.468.750		
21	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi		670.433.000	-	450.000.000	246.043.000	604.512.500	90,2	-	#DIV/0!	450.000.000	288.000.000		
22	Pemeliharaan Rutin Peralatan Studio, komunikasi dan Infosmarsi		99.350.000	91.350.000	80.000.000	99.400.000	88.962.600	89,5	89.750.000	98,25	80.000.000	99.400.000		
23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan		199.900.010	704.210.000	500.000.000	505.478.375	185.256.000	92,7	697.500.000	99,05	500.000.000	505.478.375		
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		871.551.328	1.022.924.400	800.000.000	783.754.000	828.909.100	95,1	925.668.730	90,49	800.000.000	783.754.400		
25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan		542.515.000	587.042.000	500.000.000	497.400.000	462.696.955	85,3	579.375.000	98,69	500.000.000	497.400.000		
26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		2.326.653.807	1.287.092.000	1.500.000.000	2.981.920.000	2.115.924.567	90,9	1.255.000.000	97,51	1.500.000.000	3.475.670.000		
27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan rumah jabatan		93.872.500	72.847.500	100.000.000	154.000.000	63.408.100	67,5	69.375.000	95,23	100.000.000	154.000.000		

28	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan perlengkapan kantor			470.448.700	519.050.000	250.000.000	369.200.000	338.470.600	71,9	495.750.000	95,51	250.000.000	410.250.000	
29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur			43.600.000	58.700.000	54.000.000	36.750.000	43.600.000	100,0	54.275.000	92,46	54.000.000	39.250.000	
30	Pemeliharaan Komputer dan jaringan komputerisasi			38.500.000	55.500.000	190.080.000	56.000.000	34.950.000	90,8	53.750.000	96,85	190.080.000	69.250.000	
31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Listrik, Telepon dan Air			56.700.000	40.000.000	46.200.000	80.000.000	48623348	85,8	39.750.000	99,38	46.200.000	80.000.000	
32	Pengelolaan , pengawasan dan pengendalian Asset SKPD			177.200.000	400.908.000	85.000.000	276.092.000	175.185.000	98,9	397.475.000	99,14	85.000.000	276.092.000	
33	Rehab sedang/berat rumah jabatan												40.000.000	
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DISIPLIN APARATUR</b>			<b>1.374.895.000</b>	<b>1.276.990.000</b>	<b>661.600.000</b>	<b>763.220.000</b>	<b>1.184.054.100</b>	<b>86,1</b>	<b>1.228.450.000</b>	<b>96,20</b>	<b>661.600.000</b>	<b>763.220.000</b>	
33	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			799.445.000	661.600.000	661.600.000	763.220.000	789.387.500	98,7	653.450.000	98,77	661.600.000	763.220.000	
34	Pelantikan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumbar Periode 2014-2019			575.450.000				394.666.600	68,6	-				
35	Pelantikan Gubernur Sumatera Barat periode 2015-2020				615.390.000	-				575.000.000	93,44			
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>			<b>601.032.132</b>	<b>575.070.000</b>	<b>654.916.000</b>	<b>720.407.600</b>	<b>377.353.655</b>	<b>62,8</b>	<b>542.493.000</b>	<b>94,34</b>	<b>654.916.000</b>	<b>826.363.000</b>	

36	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			106.511.520	58.604.000	100.000.000	132.458.000	37.847.000	35,5	49.575.000	84,59	100.000.000	132.458.000	
37	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			216.818.600	166.796.000	200.000.000	206.166.000	71.518.300	33,0	150.754.000	90,38	200.000.000	206.166.000	
38	Pengembangan Sumber Daya Manusia			277.702.012	234.916.000	234.916.000	353.144.000	267.988.355	96,5	229.789.000	97,82	234.916.000	353.144.000	
39	Pelatihan Kantor Sendiri				114.754.000	120.000.000	134.595.000			112.375.000	97,93	120.000.000	134.595.000	
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>			<b>498.260.000</b>	<b>476.039.868</b>	<b>502.000.000</b>	<b>433.504.800</b>	<b>396.611.000</b>	<b>79,6</b>	<b>473.102.000</b>	<b>99,38</b>	<b>502.000.000</b>	<b>433.504.800</b>	
40	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			159.920.000	111.266.000	127.000.000	87.968.000	115.756.100	72,4	109.765.000	98,65	127.000.000	87.968.000	
41	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD			106.120.000	84.506.000	85.000.000	85.000.000	67.047.900	63,2	83.768.000	99,13	85.000.000	85.000.000	
42	Penatausahaan Keuangan SKPD			232.220.000	280.267.868	290.000.000	260.536.800	213.807.000	92,1	279.569.000	99,75	290.000.000	260.536.800	
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN</b>			<b>792.608.000</b>	<b>764.865.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>755.919.000</b>	<b>95,4</b>	<b>754.308.000</b>	<b>98,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
43	Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah			792.608.000	764.865.500		-	755.919.000	95,4	754.308.000	98,62	-	-	
<b>VII I</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS</b>			<b>36.202.199.300</b>	<b>23.014.994.850</b>	<b>35.410.799.544</b>	<b>49.961.443.000</b>	<b>31.224.041.093</b>	<b>86,2</b>	<b>22.382.107.800</b>	<b>97,25</b>	<b>35.410.799.544</b>	<b>49.961.443.000</b>	

	LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH													
44	Pembahasan Rancangan Perda			11.632.933.500	13.241.314.000	12.464.478.000	17.430.830.000	10.240.091.200	88,0	12.759.450.000	96,36	12.464.478.000	17.430.830.000	
45	Reses			6.384.100.000	3.069.844.000	3.069.844.000	5.352.920.000	6.153.675.000	96,4	3.057.979.000	99,61	3.069.844.000	5.352.920.000	
46	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah			4.511.106.800	5.343.337.000	7.214.537.000	10.623.437.000	3.396.357.700	75,3	5.214.706.800	97,59	7.214.537.000	10.623.437.000	
47	Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD			8.080.765.000	1.203.925.250	4.998.036.500	4.905.132.500	7.354.003.900	91,0	1.200.397.000	99,71	4.998.036.500	4.905.132.500	
48	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			155.924.600	156.574.600	173.050.000	191.950.000	81.142.000	52,0	149.575.000	95,53	173.050.000	191.950.000	
49	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi ke luar Daerah			5.437.369.400	-	2.579.600.544	5.428.484.000	3.998.771.293	73,5	-		2.579.600.544	5.426.484.000	
50	Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah					896.456.500	1.559.048.000					896.456.500	1.559.048.000	
51	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang- undangan					66.003.000	78.663.000					66.003.000	78.663.000	
52	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, keserasian peraturan perundang- undangan					68.494.000	88.038.500					68.494.000	88.038.500	
53	Seminar dalam rangka pembahasan Ranperda					120.300.000	359.055.000					120.300.000	359.055.000	

54	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah					3.300.000.000	3.529.023.000					3.300.000.000	3.529.023.000	
55	Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya komunikasi dan informasi					460.000.000	460.000.000					460.000.000	416.862.000	
<b>IX</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENATAAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>			<b>205.382.000</b>	<b>233.997.000</b>	-	-	<b>169.656.800</b>	<b>82,6</b>	<b>225.471.000</b>	<b>96,36</b>	-	-	
56	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan			62.483.000	56.903.000	-	-	58.756.200	94,0	54.975.000	96,61	-	-	
57	Kajian Peraturan Perundang-undang Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, keserasian peraturan perundang-undangan			63.824.000	58.494.000	-	-	56.474.600	88,5	56.499.000	96,59	-	-	
58	Seminar dalam Rangka Pembahasan Ranperda			79.075.000	118.600.000	-	-	54.426.000	68,8	113.997.000	96,12	-	-	
<b>X</b>	<b>PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA</b>			<b>2.053.804.700</b>	<b>3.297.197.000</b>	-	-	<b>1.906.627.549</b>	<b>284,7</b>	<b>2.979.755.000</b>	<b>287</b>	-	-	
59	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah			2.053.804.700	3.297.197.000	-	-	1.906.627.549	92,8	2.979.755.000	90,37	-	-	
<b>XI</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANAGAN</b>			<b>77.945.400</b>	<b>466.553.000</b>	-	-	<b>74.784.400</b>	<b>95,9</b>	<b>459.575.000</b>	<b>99</b>	-	-	

	<b>KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA</b>													
60	Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya komunikasi dan informasi			77.945.400	466.553.000		-	74.784.400	95,9	459.575.000	98,50	-	-	
<b>XII</b>	<b>PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN</b>			-	-	<b>286.000.000</b>	<b>314.600.000</b>	<b>84.264.800</b>	<b>85,6</b>	<b>82.500.000</b>		<b>286.000.000</b>		
61	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip					286.000.000	314.600.000	84.264.800	85,6	82.500.000	#DIV/0!	286.000.000		
	<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>63.090.953.116</b>	<b>61.694.744.110</b>	<b>65.497.911.144</b>	<b>72.047.702.258</b>	<b>55.326.079.927</b>	<b>87,7</b>	<b>44.965.246.764</b>	<b>72,88</b>	<b>65.497.911.144</b>	<b>90.202.408.082</b>	

**b. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD**

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dari 17 Kegiatan yang ada pada Program ini yang mendapat prosentase terendah adalah Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar 84%, kegiatan Penyediaan Jasa Pembinaan Mental Fisik Aparatur dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 50.29% dan kegiatan pengelolaan dan pendataan dokumen dan arsip SKPD dengan realisasi fisik sebesar 95% dan keuangan sebesar 72.75%. Ketiga kegiatan ini rendah realisasinya disebabkan Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rendah realisasi keuangan kegiatan disebabkan biaya surat kabar dan majalah dibawah perkiraan sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi kalau PPTK bekerja secara optimal..

Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

Kegiatan penyediaan Pembinaan mental dan fisik aparatur dilaksanakan dalam bentuk wirid mingguan dan senam kesegaran jasmani ( SKJ ) yang dilaksanakan setiap minggu pada jam dinas kantor dengan jadwal adalah sebagai berikut : wirid mingguan dilaksanakan setiap pagi jumat dilaksanakan pukul 07.30 sampai pukul 08.30 dengan mendatangkan penceramah/Dai yang ada di kota Padang pelaksanaannya diluar pelaksanaan wirid di Masjid Raya Sumatera Barat, dan senam kesegaran jasmani dilaksanakan setiap pagi Rabu dengan mendatangkan instruktur senam dari kota padang yang pelaksanaannya dari pukul 07.30 s.d. 08.30. Secara fisik kegiatan ini terlaksana sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar 50.29%. Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena kurangnya pelaksanaan wirid di kantor karena acara wirid mingguan dialihkan pada Masjid Raya sehingga acara wirid dijadwalkan 4 kali dalam satu bulan hanya terlaksana sebanyak 2 ( dua ) kali begitu juga acara senam pagi pada bulan puasa acara senam tidak diadakan, itu yang menyebabkan rendahnya realisasi keuangan pada kegiatan ini.

Pada kegiatan Pengelolaan dan Pendataan Dokumen Arsip SKPD, kegiatan ini bertujuan untuk mendata seluruh dokumen-dokumen di Sekretariat DPRD khusus untuk dokumen yang berkaitan dengan produk DPRD, sidang dan rapat DPRD sehingga seluruh dokumen terdata dengan baik dan apabila diperlukan sewaktu-waktu dokumen tersebut dapat ditemukan dengan tidak membutuhkan waktu yang begitu lama untuk mendapatkannya. Kegiatan ini sampai akhir tahun 2015 secara fisik terlaksana sebesar 95% dengan realisasi keuangan sebesar 72.75% rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini karena pengadaan Belanja Modal Pengadaan Sistem Komputer tidak dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan, karena Pejabat pengadaan tidak mendapatkan spesifikasi dari Sistem Komputer dimaksud.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada program ini terdapat 17 kegiatan, dari 17 ( tujuh belas ) kegiatan tersebut ada 6 ( enam ) kegiatan yang capaian kinerjanya dibawah batas maksimal baik fisik maupun keuangan dibawah 85% yaitu:

- a. Pembangunan Gedung Kantor sampai akhir tahun 2015 secara fisik kegiatan ini terlaksana 100 % namun realisasi keuangan hanya sebesar 76.35%. Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini karena pada pebayaran pengelola teknis tidak dilakukan penyesuaian harga

karena biaya pengelola teknis baru dibayarkan pada akhir tahun sedangkan dana yang dianggarkan masih dalam DPA murni pembayaran dibawah DPA yang dianggarkan

- b. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi sampai akhir 2015, kegiatan ini realisasi secara fisik mencapai 100 % namun realisasi keuangan hanya sebesar 69.79 % ini disebabkan oleh karena sebagian peralatan studio dan informasi tidak diperbaiki sehingga dana yang dianggarkan tidak terpakai semuanya menyebabkan rendahnya parsentase keuangan kegiatan ini
- c. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas/mess  
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemeliharaan terhadap rumah dinas pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat, sampai akhir tahun 2015 kegiatan secara fisik terlaksana sebesar 100% namun realisasi keuangan hanya mencapai 41,83% ini disebabkan karena tidak semua item-item yang ada dalam DPA dilaksanakan sehingga anggaran yang dianggarkan dalam perbaikan tidak digunakan sehingga realisasi keuangan rendah dan anggaran yang dianggarkan dalam kegiatan ini untuk berjaga-jaga kalau dilakukan perbaikan terhadap rumah jabatan.
- d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan ini ditujukan agar terpelihara dan terawatnya peralatan dan perlengkapan kantor DPRD. Sampai akhir tahun 2015 secara fisik kegiatan ini telah terlaksana 100 % namun realisasi keuangan hanya sebesar 80.24% hal ini disebabkan karena belum dilaksanakan pemeliharaan terhadap peralatan dan perlengkapan kantor karena barang – barang yang ada masih dalam kondisi baik dana yang dianggarkan adalah untuk berjaga-jaga kalau dilakukan perbaikan terhadap peralatan yang ada.
- e. Pemeliharaan rutin/berkala Meubeleur  
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemeliharaan terhadap meubeleur kantor, sampai akhir tahun 2015 kegiatan ini secara fisik terlaksana sebesar 100% namun realisasi keuangan hanya mencapai 42.20% hal ini karena meubeleur kantor yang ada sekarang tidak semua dilakukan perbaikan karena meubeleur masih dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan sehingga biaya yang digunakan untuk pemeliharaan meubeleur tidak semua terpakai.
- f. Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi dan Jaringan  
Kegiatan bertujuan untuk melakukan pemeliharaan terhadap instalasi listrik dan jaringan kantor Sekretariat DPRD, kegiatan ini secara fisik terlaksana sebesar 100%, realisasi keuangan hanya sebesar 54.91% karena tidak semua jaringan dan instalasi di Sekretariat DPRD diperbaiki, anggaran yang ada guna untuk berjaga-jaga kalau terjadi jaringan yang rusak seperti jaringan listrik, telepon dan air.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, pada program ini terdapat 4 kegiatan, dari 4 (empat) kegiatan tersebut semuanya capaian kinerjanya tidak memenuhi target baik fisik maupun keuangan yakni,

- a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan adalah kegiatan yang diperuntukan bagi pegawai Sekretariat DPRD untuk

mengikuti kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan staf Sekretariat DPRD. Secara fisik kegiatan terlaksana sebesar 100 % dengan realisasi keuangan sebesar 28.84 %. Penyebab rendahnya capaian kinerja tersebut disebabkan kurangnya undangan yang diterima untuk diikuti oleh staf Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat,

- b. Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan staf, meningkatkan wawasan dibidang tugas masing-masing karena peraturan yang berkaitan dengan bidang tugas selalu berubah-ubah dan berkembang terus menerus. Kegiatan bimtek ini diikuti pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah baik Pemerintah Daerah maupun pusat dengan mempedomani undangan yang dikirimkan ke masing-masing SKPD, sampai akhir tahun 2015 kegiatan ini secara fisik terlaksana 100% dengan tingkat capaian keuangan hanya sebesar 51.69%. Rendahnya realisasi capaian keuangan kegiatan ini disebabkan kurangnya pelaksanaan Bimtek sehingga biaya kontribusi dan biaya belanja harian tidak dapat dicairkan sehingga realisasi keuangan kegiatan ini dibawah batas minimal, anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini adalah untuk mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan. karena kurangnya pelaksanaan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah pusat maupun daerah, maka realisasi keuangan kegiatan ini belum mencapai target yang ditetapkan
- c. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)  
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan staf dibidang tugasnya masing-masing dengan melakukan study banding ke daerah yang dianggap sudah lebih memahami dalam melaksanakan tugas-tugas dibidangnya masing-masing, sampai akhir tahun 2015 kegiatan ini secara fisik terlaksana sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar 79.35%. Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini karena efisiensi harga tiket dengan plafon anggaran yang disediakan, dalam DPA anggaran yang disediakan lebih tinggi dari harga riil tiket dilapangan sehingga terjadi sisa lebih dalam pelaksanaan kegiatan menyebabkan terjadi realisasi dibawah pagu dana.
- d. Pelatihan Kantor Sendiri, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman staf terhadap tugas-tugasnya dengan melakukan pelatihan kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya, sampai akhir tahun 2015 kegiatan ini secara fisik terlaksana sebesar 100% namun realisasi keuangan hanya sebesar 66,66% ini disebabkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan dengan menekan harga makan minum bagi peserta pelatihan dengan harga dibawah plafon yang disediakan.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan, pada program ini ada 3 ( tiga ) kegiatan namun 2 ( dua ) diantaranya belum mencapai target yang diharapkan baik fisik maupun keuangan diantaranya adalah :

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.  
Kegiatan ini ditujukan untuk menyusun laporan kegiatan yang sudah dilaksanakan, baik laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan, kegiatan ini sampai dengan akhir

tahun 2015, secara fisik terlaksana sebesar 95 % dan realisasi keuangan sebesar 87.10 %. Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena belanja cetak dan penjiilidan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya karena laporan akhir tahun belum dijilid dan digandakan karena masih dalam pembenahan sedangkan tanggal 31 Desember Bendahara pengeluaran sudah membuat laporan sehingga realisasi keuangan kegiatan ini tidak mencapai batas minimal yang ditetapkan sedangkan secara fisik kegiatan sudah dilaksanakan sepenuhnya.

b. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun dan menyusun anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya pada dokumen anggaran baik anggaran murni, pergeseran anggaran dan anggaran perubahan, dengan tujuan anggaran dapat tersusun dan terencana sesuai dengan kebutuhan. Sampai akhir tahun 2015 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik sebesar 100% namun realisasi keuangan hanya sebesar 70.79% rendahnya realisasi kegiatan ini disebabkan karena terkait dengan penetapan APBD tahun 2016. APBD tahun 2016 biaya cetak dan penjiilidan DPA tidak bisa dicairkan untuk Anggaran Tahun 2016.

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, pada program ini terdapat 6 ( enam ) kegiatan, 4 ( empat ) kegiatan belum mencapai target yang ditetapkan yaitu :

a. Kegiatan Reses, kegiatan ini bertujuan untuk menjemput aspirasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh Anggota DPRD melalui reses perorangan dan reses kelompok, kegiatan ini sampai akhir tahun 2015 secara fisik terlaksana sebesar 100% namun realisasi keuangan hanya terlaksana sebesar 71.94, rendahnya realisasi keuangan kegiatan karena tidak semua anggota DPRD melaksanakan reses baik kelompok maupun perorangan, sehingga biaya makan dan minum tidak semuanya dicairkan mengakibatkan rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini.

b. Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sampai akhir tahun 2015 kegiatan ini secara fisik dapat terlaksana 100% namun dalam realisasi keuangan hanya tercapai sebesar 78.61%, rendahnya realisasi keuangan kegiatan disebabkan karena tidak semua anggota DPRD mengikuti Workshop dalam daerah sehingga biaya penginapan dan biaya kontribusi untuk anggota DPRD tidak dicairkan hal ini menyebabkan rendahnya realisasi keuangan.

c. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan ini ditujukan untuk mensosialisasikan kegiatan dan Produk-produk DPRD yang dihasilkan selama tahun anggaran 2015, sampai akhir tahun 2015 kegiatan ini secara fisik terlaksana sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar 48.78 % rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena tidak semua anggota DPRD mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan, sehingga biaya perjalanan dinas yang dianggarkan untuk sosialisasi ini tidak semuanya dicairkan..

d. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi-Komisi ke Luar Daerah.

Pelaksanaan kegiatan ini ditujukan untuk melaksanakan tugas-tugas kedewanan dengan melakukan kunjungan kerja ke Luar Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan melihat perkembangan pembangunan di daerah tempat tujuan untuk dapat diterapkan di Daerah Sumatera Barat, sekaligus melakukan studi perbandingan untuk disampaikan kepada Pemerintah Sumatera Barat untuk dapat dijadikan sebagai bahan pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat. Kegiatan ini sampai akhir tahun anggaran 2015, kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan komisi-komisi ke luar daerah realisasi fisiknya mencapai 100 % dengan realisasi keuangan hanya mencapai 64.60%. Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena efisiensi anggaran dengan mengurangi kunjungan kerja keluar daerah sehingga dengan pengurangan kunjungan kerja ke luar daerah maka realisasi anggaran kunjungan kerja dimaksud rendah.

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan tamu Pemerintah Daerah kegiatan ini dapat terlaksana dengan capaian target dapat terpenuhi baik fisik maupun keuangan.

Program Peningkatan Penataan Perturan Perundang-undangan, program ini terdiri dari 3 kegiatan, dimana 1 kegiatan capaian kinerjanya belum mencapai target yang ditetapkan kurang dari 85% yaitu kegiatan seminar dalam rangka pembahasan Ranperda. Sampai akhir tahun 2015 secara fisik terlaksana sebesar 100% namun realisasi keuangan hanya sebesar 49.62%. Rendahnya realisasi keuangan kegiatan disebabkan karena penghematan dan efisiensi karena kegiatan perjalanan dinas dalam daerah tidak digunakan sehingga terjadi penghematan pembiayaan sedangkan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media, program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, kegiatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi pembangunan di Sumatera Barat dengan bekerjasama dengan Mass Media, kegiatan ini sampai akhir tahun 2015 secara fisik terlaksana 100% namun realisasi keuangan hanya mencapai 49.62%, rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena efisiensi pelaksanaan kegiatan dengan menggabungkan biaya makan minum kegiatan dengan biaya makan minum rapat-rapat sehingga biaya makan minum kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah tidak dicairkan sehingga terjadi efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi, kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap sumber daya komunikasi yang tersebar di Kab/kota dengan tujuan agar terjalin hubungan komunikasi dengan kab/kota, sampai akhir tahun 2015 kegiatan secara fisik terlaksana 100% dengan realisasi keuangan hanya mencapai 59.03% ini disebabkan dengan adanya efisiensi pelaksanaan kegiatan dengan melaksanakan kegiatan diruangan kantor yang semula kegiatan ini dilaksanakan di hotel

sehingga biaya hotel tidak dicairkan menyebabkan rendahnya realisasi keuangan kegiatan.

Untuk melihat keberhasilan dan kegagalan dari analisa yang dikemukakan di atas dapat dilihat pada tabel T.VI.C.1 sebagaimana ditampilkan pada penjelasan terdahulu.

Dari uraian diatas capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) yaitu pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap tugas dan fungsi Dewan sesuai SOP, dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu Pelaksanaan Program Nasional yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu Program yang menyangkut dengan Program Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan beberapa kegiatan. Jenis Indikator yang dikaji sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan standar Operasional Prosedur (SOP) sudah mengacu pada PP No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD dan dijabarkan dalam Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur sporting staf memfasilitasi DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik sebagai fungsi Legislatif, Fungsi Anggaran dan Fungsi pengawasan, maka tolok ukur kinerja Sekretariat DPRD adalah ditandai dengan terlaksananya fungsi DPRD sesuai dengan Program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam Rencana Kerja tahun 2017 ini Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat telah memiliki tolok ukur dan Indikator Kinerja yang akan diuji yaitu Tolok ukur pertama adalah Terlaksananya Fungsi, Tugas, Wewenang dan Hak DPRD sesuai dengan waktu yang ditetapkan dengan Indikator Kinerja adalah Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Tolok ukur kedua adalah Meningkatnya Pelayanan Penyampaian Aspirasi masyarakat ke DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Indikator Kinerja adalah Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan Prosedur (SOP). Tolok ukur ketiga adalah tersedianya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas untuk menunjang tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Indikator Kinerja adalah Prosentase Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang mengikuti Pendidikan dan Latihan (Diklat). Tolok ukur keempat adalah Penempatan staf sesuai dengan disiplin ilmu dan keahlian yang dimiliki dengan Indikeator Kinerja adalah Prosentase kesesuaian penempatan PNS antara disiplin ilmu dengan tugas pokok. Tolok ukur kelima adalah Meningkatkan disiplin staf dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan indikator kerjanya adalah Peningkatan kehadiran staf. Untuk menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja yang ditetapkan dengan capaian yang diperoleh dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan target yang ditetapkan. Untuk melihat hasil capaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terdapat pada Tabel T.VI.C.1 yang sudah ditampilkan di atas.

**c. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD**

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, dimana penyelenggaraan Pemerintah yang baik (*Good Governance*) yang bersendikan pada Isu Penting yang diartikan pada faktor-faktor yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan dari organisasi diantaranya mempengaruhi terjadinya perubahan paradigma dalam melaksanakan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Undang-undang No.. 09 Tahun 2015 Perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah telah membawa perubahan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat DPRD, untuk mendukung hal tersebut Sekretariat DPRD melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Tingkat Pelayanan kinerja SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD.

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk Peningkatan Kinerja DPRD

Dalam rangka mengantisipasi pelayanan yang semakin lama semakin komplit maka Sekretariat DPRD pada akhir tahun 2015 dihadapkan dengan permasalahan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas DPRD dimana Sekretariat DPRD belum menyediakan sarana kendaraan dinas penunjang masing-masing Anggota DPRD satu orang satu unit kendaraan, saat sekarang baru bisa memfasilitasi Anggota DPRD dengan kendaraan operasional pada masing-masing alat kelengkapan Dewan .

2. Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan

Untuk mempercepat proses pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada awal tahun 2015 semua perangkat pengelola Keuangan yaitu PA, KPA, PPTK, PPK, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Penerima Barang sudah ditetapkan dan telah bekerja untuk mempercepat proses penggunaan anggaran.

3. Gedung Telah Berfungsi dengan baik, namun sekarang yang menjadi isu strategis adalah penempatan Komisi-komisi yang belum tertata dengan baik karena penempatannya terpecah pada lantai satu dan lantai dua seharusnya ditempatkan pada satu tempat yaitu pada lantai dua atau lantai satu saja, karena kondisi gedung yang tidak memungkinkan maka penempatan komisi-komisi terpecah seperti adanya sekarang, kalau periode sebelumnya pada periode 2009-2014 seluruh komisi kita tempatkan pada lantai dua sehingga kelihatannya rapi dan indah seluruh anggota adanya pada lantai dua sehingga kalau melaksanakan rapat tidak perlu naik ke lantai dua kedepan Pemerintah Daerah sudah mengarah kesana dimana Anggota DPRD kita tempatkan pada satu tempat dan terpisah dari Sekretariat DPRD dengan akan dilaksanakan pembangunan Gedung Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat yang Insya Allah akan dimulai tahun 2016 ini.

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD

1. Disiplin yang masih lemah

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur staf dalam mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi dewan saat ini dihadapkan pada kondisi staf yang masih kurang terhadap disiplin baik terhadap masuk kantor maupun dalam jam pulang kantor, ini dapat dilihat pada saat Sekretariat DPRD melaksanakan apel pagi, dari laporan yang disampaikan oleh masing-masing bagian belum ada yang melaporkan kepada pengambil apel lengkap seratus persen tetap saja ada kurangnya tanpa keterangan.

2. Kurangnya Kemauan Kerja

Dalam pelaksanaan tugas-tugas di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang menjadi kendala suksesnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dapat dilihat dari kemauan kerja dari Staf Sekretariat DPRD itu sendiri, pekerjaan selalu diiming-imingi dengan imbalan sehingga suatu pekerjaan dapat terlaksana apabila ada harapan didepannya kalau tidak ada pekerjaan tersebut akan sulit terlaksana dengan sendirinya, kalau keberhasilan suatu organisasi hal seperti itu perlu dibuang habis dari diri personil, karena hal yang demikian tidak berdampak baik kepada organisasi. Jika kedua permasalahan ini tidak segera diatasi oleh Sekretariat DPRD maka akan berpengaruh/berdampak terhadap pelayanan Sekretariat DPRD baik kepada DPRD maupun kepada masyarakat, ini akan mempengaruhi indikator Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap tugas pokok dan fungsi Dewan sesuai SOP dan Indikator Pelayanan Sekretariat DPRD kepada masyarakat sesuai SOP.

c. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala Daerah

Dari kondisi yang kami kemukakan di atas dengan memanfaatkan peluang yang ada serta memaksimalkan staf yang ada hal ini tidak berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi kepala Daerah dimana visi Kepala Daerah adalah Terwujudnya masyarakat Sumatera Barat yang adil, sejahtera dan bermatabat dengan misi Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional, hal ini didukung dengan visi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu **"Menjadi Sekretariat Dewan Terbaik dalam Memfasilitasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD"** dengan misi Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

1. Memberikan Pelayanan kepada DPRD dalam melaksanakan Fungsi, Tugas, Wewenang dan Hak Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Memfasilitasi Masyarakat dalam menyampaikan Aspirasi ke DPRD
3. Meningkatkan Kualitas staf Aparatur dalam memberikan pelayanan kepada DPRD

Dengan memanfaatkan kondisi yang ada Alhamdulillah tidak berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat sampai saat sekarang seluruh program dan kegiatan yang sudah ditetapkan secara keseluruhan dapat terlaksana dengan baik, jika hal ini tidak segera diatasi maka akan berpengaruh terhadap Visi Sekretariat DPRD yaitu menjadi Sekretariat Dewan terbaik dalam memfasilitasi tugas pokok,

dan fungsi Dewan dan akan berdampak terhadap 2 misi dari 3 misi Sekretariat DPRD yaitu misi pertama Memberikan pelayanan kepada DPRD dalam melaksanakan Fungsi, Tugas, Wewenang dan hak dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan misi kedua yaitu Memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi ke DPRD dan berdampak kepada Visi dan Misi kepala Daerah yaitu pada Misi kedua yaitu mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional

d. Tantangan dan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

Dengan telah dilantiknya Gubernur Sumatera Barat oleh Menteri Dalam Negeri tantangan yang mungkin dihadapi oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah penyesuaian dengan Visi dan Misi Gubernur yang baru yang harus disesuaikan dengan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat,. sedangkan peluang yang ingin ditingkatkan dalam pencapaian kinerja organisasi adalah peningkatan disiplin kinerja baik terhadap anggota DPRD maupun terhadap staf Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dan mendukung Visi dan misi kepala Daerah yang baru. Selanjutnya peluang untuk 5 (lima) tahun kedepan dalam meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD dengan jumlah anggota DPRD yang 65 orang Sekretariat DPRD dituntut untuk melaksanakan fungsinya secara optimal dengan mendorong Anggota DPRD untuk berkarya lebih baik dalam melahirkan produk ( Perda ) yang berkualitas yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat dengan memberikan pelayanan semakin baik kepada DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD. Namun dibalik peluang tersebut Sekretariat DPRD dihadapkan dengan tantangan yang semakin berat pula, karena dengan keterbatasan dan kemampuan staf dalam memberikan pelayanan kepada DPRD, maka dalam waktu 5 ( lima ) tahun kedepan Sekeretariat DPRD harus menciptak Staf yang paripurna dibidang tugasnya dengan melakukan pelatihan baik secara fungsional maupun structural dengan melaksanakan pelatihan melalui Peningkatn Kapasitas Sumber Daya Manusia ( SDM ).

e. Dari isu-isu penting dan peluang yang kami kemukakan di atas maka untuk tahun 2017 kami akan berusaha dan merekomendasikan dengan Memberikan pelayanan kepada DPRD dalam melaksanakan Fungsi, Tugas, Wewenang dan hak dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi ke DPRD dan berdampak kepada Visi dan Misi kepala Daerah dengan mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional merumuskan program dan kegiatan yang akan dirumuskan/dikemukakan pada penelaahan usulan program dan kegiatan Rencana Kerja ini

**d. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Kalau kita bandingkan dengan rancangan awal Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah ( RKPD ) terdapat perbedaan antara program kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2012 dengan tahun 2013 tahun 2014 dan tahun 2015 dan tahun 2016, dimana pada tahun 2012 Program Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat berjumlah 9 Program dengan jumlah kegiatan sebanyak 47, tahun 2013 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat mengusulkan sebanyak 12 program dengan 51 kegiatan, tahun 2014 Sekretariat DPRD mengusulkan 10 program dengan jumlah

kegiatan sebanyak 52 kegiatan, Pada tahun 2015 Sekretariat DPRD melaksanakan 10 Program dengan 55 dan pada tahun 2016 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat mengusulkan 6 Program dan 54 kegiatan, dapat kami sampaikan Rencana Kerja tahun 2017 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat mengusulkan 6 Program dan 52 kegiatan sesuai kebutuhan untuk dilaksanakan tahun 2017. Dapat kami jelaskan disini bahwa pada tahun 2017 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat mengusulkan 6 (enam) program dan 52 (lima puluh dua) kegiatan, dari Program dan kegiatan yang kami usulkan nanti ada kegiatan yang tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD namun programnya ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk menindak lanjuti kegiatan ini akan dimasukkan dalam Program dan Kegiatan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD tahun 2016-2021.

TABEL . T.VI.C.7  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

SEKRETARIAT DPRD

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF ( Rp )	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>#DIV/0!</b>	<b>16.336.563.757</b>	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	100,00	1.192.814.000	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0	100,00	1.741.740.000	
						Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	0	Terlaksananya pembayaran pajak bumi dan bangunan, dan asuransi	100,00	307.950.000	

							kendaraan			
						Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan rumah dinas	100,00	710.701.725
						Penyediaan Alat Tulis Kantor	0	Tersedianya alat tulis kantor	100,00	313.284.250
						Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip	0	Terlaksananya penataan dokumen / Arsip SKPD	100,00	374.143.000
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor yang tersedia kop surat, amplop, map, buku kenang-kenangan dan papan nama	100,00	370.745.000
						Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	100,00	79.442.300
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00	2.874.420.000
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	Tersedianya peralatan rumah tangga DPRD	100,00	226.900.000

						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	Tersedianya bahan bacaan dan buku-buku peraturan	100,00	657.308.000	
						Penyediaan Makanan dan Minuman	0	Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat	100,00	590.985.000	
						Rapat-rapat Koordnasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Sumatera Barat dan Prov. Luar Sumbar	Terfasilitasinya keikutsertaan tenaga aparatur Sekretariat DPRD untuk rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah bagi pimpinan dan anggota dewan	100,00	5.426.552.000	
						Penyediaan Jasa Sopir	Padang	Tersedianya sopir	100,00	305.232.700	
						Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	0	Tersedianya pengamanan kantor	100,00	717.395.282	
						Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	0	Terselenggaranya pembinaan fisik dan mental aparatur	100,00	57.150.000	
						Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan			100.00	390.000.000	

					kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD					
					<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>				<b>16.409.280.000</b>	
					Pembangunan Gedung Kantor	Padang	Tersedianya Fasilitas kerja PNS dan Anggota DPRD	100,00	16.000.000.000	
					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	100,00	598.150.000	
					Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas/Me ss	0	Tersedianya peralatan rumah jabatan	100,00	640.000.000	
					Pengadaan Meubeleur	0	Tersedianya meubeleur Kantor dan Rumah Dinas	100,00	213.500.000	
					Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	0	Tersedianya komputer untuk menunjang kelanacaran tugas	100,00	177.368.750	
					Pengadaan Alat studio, alat komunikasi dan	0	Tersedianya alat studio dan alat komunikasi untuk	100,00	246.043.000	

						alat informasi		mendukung kelancaran tugas-tugas			
						Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas dan mess	0	Terpeliharanya rumah dinas dan mess	100,00	505.478.375	
						Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	Terpeliharanya gedung kantor	100,00	783.754.000	
						Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	0	Terpeliharanya mobil jabatan/Dinas DPRD	100,00	497.400.000	
						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	0	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	100,00	2.981.920.000	
						Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perengkapan rumah jabatan/dinas	0	Terpeliharanya peralatan/perengkapan rumah jabatan	100,00	154.000.000	
						Pemeliharaan rutin/berkala mobileur	0	Terpeliharanya mobileur	100,00	36.750.000	
						Pemeliharaan rutin/berkala instalasi dan	0	Terpeliharanya instalasi listrik, telpon dan air	100,00	80.000.000	

						jaringan					
						Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi	0	0	100,00	56.000.000	
						Pemeliharaan rutin/berkala alat studio, komunikasi dan informasi	0	0	100,00	99.400.000	
						Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	0	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00	369.200.000	
						Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Padang	Tertata pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Asset SKPD	100,00	276.092.000	
						<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DISIPLIN APARATUR</b>			<b>100,00</b>	<b>763.220.000</b>	
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0	0	100,00	763.220.000	

						<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>				826.363.000	
						Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	0	0	100,00	132.458.000	
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	0	0	100,00	206.166.000	
						Pengembangan Sumber Daya Manusia ( SDM )	0	0	100,00	353.144.000	
						Pelatihan Kantor Sendiri ( PKS )	Padang	Terlaksananya pelatihan Pegawai Sekrt.DPRD	100,00	134.595.000	
						<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGA N SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>			100,00	433.504.800	
						Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	0	0	100,00	87.968.000	

						Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
						Penatausahaan Keuangan SKPD	0	0	100,00	260.536.800	
						Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	0	0	100,00	85.000.000	
						<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>			100,00	49.961.443.000	
						Pembahasan Rancangan Perda	0	0	100,00	17.430.830.000	
						Reses	0	0	100,00	5.352.920.000	
						Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	0	0	100,00	10.623.437.000	

						Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD	0	0	100,00	4.905.132.500	
						Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	0	0	100,00	191.950.000	
						Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi ke luar Daerah	0	0	100,00	5.426.484.000	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu	Padang	Tersedianya makanan dan minuman tamu-tamu DPRD	100,00	1.559.048.000	
						Koordinasi Kerjasama permasalahan peraaturan perundang-undangan	Sumatera Barat dan luar prov.Sumbar	Terjalannya kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	100,00	78.663.000	
						Kajian Peraturan perundang-undangan Daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Sumatera Barat dan luar Prov.Sumbar	Terlaksananya kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi	100,00	88.038.500	

						Seminar dalam rangka pembahasan Ranperda	Sumatera Barat dan luar prov.Sumbar	Terlaksananya legalisasi rancangan peraturan DAerah	100,00	359.055.000	
						Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Sumatera Barat dan luar Prov.Sumbar	Tersedianyanya dokumen pelaksanaan kegiatan dewan	100,00	3.529.023.000	
						Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya komunikasi dan informasi	Prov.Sumbar dan luar Prov.Sumbar	Tersedianya sumber daya komunikasi dan informasi	100,00	460.000.000	
						<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>65.497.911.144</b>	

**e. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam pengusulan Program untuk tahun 2017 terjadi penggabungan program dimana lima program yaitu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat, Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan, Program Peningkatan Penataan Perundang-undangan, Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media dan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Mass Media Kerjasama Informasi dengan Mass Media, Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa disatukan menjadi Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Program Yang diusulkan ini ditujukan langsung oleh pemangku kepentingan kepada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan surat No. 050/149/XII/Set-Bappeda 2014 tgl. 31 Desember 2014, .Penggabungan Program ini disesuaikan dengan Program RPJMD Tahun 2016-2021. Dari Program dan kegiatan yang diusulkan oleh Pemangku kepentingan kepada Sekretariat DPRD maka Sekreteriat DPRD membahas surat tersebut dan melakukan rapat dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Sekretariat DPRD bahwa program yang akan kita munculkan pada tahun 2017 adalah sesuai dengan Surat No. 050/149/XII/Set-Bappeda 2014 tgl. 31 Desember 2014, Untuk itu dapat kami tampilkan Program dan kegiatan untuk tahun 2017 sebagaimana tertera dibawah ini :

**a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat  
Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, adalah merupakan kegiatan yang terkait dengan pengelolaan surat-surat baik surat masuk maupun surat keluar pada Sekretariat dan kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik adalah kegiatan yang terkait dengan penyediaan sarana jasa komunikasi, air dan listrik pada gedung, Rumah Dinas dan Mess DPRD Provinsi Sumatera Barat.
3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah  
Kegiatan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah adalah kegiatan yang bertujuan untuk penyediaan pemenuhan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rumah Dinas dan Mess DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Asuransi Kendaraan Dinas DPRD Provinsi Sumatera Barat.
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor  
Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor adalah kegiatan yang ditujukan untuk penyediaan jasa kebersihan kantor pada Sekretariat DPRD agar kebersihan dan kenyamanan kantor dapat terjaga dan terpelihara.
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor  
Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya alat tulis kantor dalam rangka menunjang kelancaran tugas-tugas Sekretariat dan tugas-tugas kedewanan selama tahun 2017

6. Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip  
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pendataan dan penataan kepada arsip-arsip DPRD khusus dibidang Produk-produk DPRD sehingga sewaktu-waktu diperlukan arsip yang berhubungan dengan produk DPRD dapat ditemukan.
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Keperluan Kantor  
Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya pencetakan dan penggandaan bahan untuk keperluan kantor selama tahun 2017
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk kepentingan dinas tahun 2017
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk kepentingan dinas pada tahun 2017
10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  
Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya peralatan rumah tangga kantor untuk kepentingan dinas pada tahun 2017
11. Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  
Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar dan majalah, buku-buku untuk kepentingan dinas pada tahun 2017
12. Penyediaan Makanan dan Minuman  
Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya makanan dan minuman untuk kepentingan kegiatan rapat-rapat DPRD dan kegiatan kedewanan lainnya tahun 2017
13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah  
Kegiatan ini ditujukan untuk penyediaan biaya perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota Dewan serta Sekretariat DPRD dalam rangka pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi baik ke dalam daerah Sumatera Barat maupun ke luar daerah Sumatera Barat pada tahun 2017
14. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor  
Kegiatan ini ditujukan agar pengamanan kantor dan rumah jabatan dinas pimpinan dapat terjaga dengan baik.
15. Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur  
Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya jasa pembinaan fisik dan mental bagi pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.
16. Penyediaan Jasa Sopir  
Kegiatan ini bertujuan untuk tersedianya tenaga sopir untuk pelaksanaan operasional kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat
17. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan Pimpinan dan Anggota DPRD  
.Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan biaya General Chek-up Anggota DPRD dan keluarganya.

**b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur**

1. Pembangunan Gedung Kantor  
Kegiatan ini merupakan lanjutan dari pembangunan Gedung Kantor DPRD Tahun 2017
2. Pengadaan Kendaraan Bermotor  
Kegiatan ini dilaksanakan untuk pengadaan kendaraan dinas operasional DPRD
3. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan /Dinas/Mess  
Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya peralatan rumah jabatan pimpinan DPRD dan Mess DPRD
4. Pengadaan Meubelaur  
Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Meubelaeur kantor dan rumah Dinas DPRD
5. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi  
Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya peralatan kantor berupa Komputer, Laptop dan peralatan komputer lainnya
6. Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi  
Kegiatan ini ditujukan agar tersedia alat monitor keperluan rapat-rapat DPRD Provinsi Sumatera Barat
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi  
Kegiatan ini bertujuan agar peralatan studio dan komunikasi dapat terpelihara dengan baik
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas dan Mess  
Kegiatan ini ditujukan agar terpeliharanya dan terawatnya Rumah Jabatan Pimpinan DPRD dan Mes DPRD dengan baik.
9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  
Kegiatan ini ditujukan agar terpelihara dan terawatnya Gedung Kantor DPRD.
10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan  
Kegiatan ini ditujukan agar terpelihara dan terawatnya mobil jabatan pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD
11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional  
Kegiatan ini ditujukan agar terpelihara dan terawatnya kendaraan operasional DPRD dan Sekretariat DPRD
12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas  
Kegiatan ini ditujukan agar terpelihara dan terawatnya perlengkapan rumah jabatan/dinas pimpinan DPRD.
13. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemeliharaan terhadap peralatan dan perlengkapan kantor
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur  
Kegiatan ini ditujukan agar terpelihara dan terawatnya meubeleur di Kantor DPRD dan Rumah Dinas/Jabatan

15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan  
Kegiatan ini ditujukan agar terpelihara dan terawatnya instalasi listrik, telepon dan air pada gedung DPRD dan rumah dinas/jabatan
16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi  
Kegiatan ini ditujukan agar terpelihara dan terawatnya peralatan komputer dan jaringan komputer kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat
17. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD  
Kegiatan ini ditujukan agar aset yang ada DPRD dapat dikelola, diawasi dan dikendalikan dengan baik.

**c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

1. Pengadaan Pakaian Dinas PNS/PH dan Anggota DPRD  
Kegiatan pengadaan pakaian dinas PNS/PH dan Anggota DPRD ditujukan untuk terwujudnya disiplin PNS/PH dan Anggota DPRD dalam berpakaian Dinas dan atributnya.

**d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan  
Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan ditujukan untuk terlaksananya peningkatan kemampuan SDM Aparatur pada Sekretariat DPRD melalui penugasan pada kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan.
2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan  
Kegiatan Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan ini ditujukan untuk terlaksananya peningkatan kemampuan SDM Aparatur pada Sekretariat DPRD melalui penugasan pada kegiatan bimbingan teknis
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia ( SDM )  
Kegiatan peningkatan wawasan aparatur ditujukan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia ( SDM ) aparatur melalui kegiatan studi komparatif ke Provinsi lain di Indonesia.
4. Pelatihan Kantor Sendiri  
Kegiatan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan Staf dalam meningkatkan kemampuan melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan mendatangkan instruktur/narasumber dari luar kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

**e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja Keuangan**

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.  
Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ditujukan agar tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.
2. Penatausahaan Keuangan SKPD  
Kegiatan penataan usahan keuangan SKPD ditujukan agar terwujudnya penataan keuangan pada Sekretariat DPRD yang lebih baik pada tahun 2017
3. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  
Kegiatan ini ditujukan untuk menghimpun seluruh masukan dan usulan program dan

kegiatan yang diusulkan dan akan ditampung dalam Rencana Kegiatan Anggaran SKPD. Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan APBD dan Perubahan APBD tahun 2016 dan 2017.

**f. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**

Kegiatan :

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyusun dan menyiapkan aturan-aturan yang akan menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Sumatera Barat.

2. Reses

Reses merupakan salah satu kegiatan Dewan yang strategis sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka menjemput aspirasi masyarakat asal daerah pemilihan anggota Dewan.

3. Kunjungan Kerja Pimpinan, Anggota Dalam Daerah

Kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota serta Sekretaris DPRD dilakukan dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah Sumatera Barat yang merupakan kegiatan dari Pimpinan dan Anggota DPRD ke 19 daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat yang didampingi oleh Staf Sekretariat DPRD dalam rangka melihat secara langsung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Disamping itu, kegiatan kunjungan kerja dalam daerah juga merupakan salah satu wujud pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan.

4. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretaris DPRD

Kegiatan peningkatan kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD serta Sekretaris DPRD, merupakan kegiatan dalam upaya meningkatkan kemampuan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Kegiatan peningkatan kapasitas ini dalam pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk studi komparasi sesuai dengan lingkup bidang tugas Komisi-komisi, workshop untuk Pimpinan dan Anggota DPRD serta pelaksanaan bimbingan teknis.

5. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini, Antara lain adalah terwujudnya peningkatan wawasan dewan tentang peraturan perundang-undangan.

6. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi-Komisi ke Luar Daerah

Kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan Komisi-Komisi ke luar daerah adalah dalam rangka peningkatan kemampuan dan pemahaman pimpinan dan anggota Komisi-Komisi terhadap tugas-tugas yang terkait dengan bidang tugas komisinya.

7. Penyediaan Jasa Pelayanan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini ditujukan untuk melayani tamu-tamu DPRD dan Sekretariat DPRD yang

datang dan berkunjung ke DPRD Provinsi Sumatera Barat.

8. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan  
Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya koordinasi, integrasi dan sinergitas Permasalahan Peraturan Perundang-undangan.
9. Kajian Peraturan Perundang-undangan daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi  
Kegiatan ini ditujukan untuk memperoleh masukan dalam penyusunan kebijakan tentang Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi, dengan tujuan adanya keserasian peraturan perundang-undangan yang dilahirkan DPRD dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi .
10. Seminar dalam rangka Pembahasan Ranperda  
Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan seminar yang dilaksanakan untuk menerima masukan dari narasumber/pakar/ahli dan LSM dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
11. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah  
Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan/menginformasikan Produk-produk DPRD kepada masyarakat melalui media massa baik cetak maupun elektronik ataupun melalui gambar-gambar yang berisikan pesan pembangunan sehingga masyarakat/public dapat mengetahui produk-produk yang dihasilkan oleh DPRD selama menjalankan tugas sebagai Anggota DPRD yang merupakan wakil Rakyat.
12. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi  
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan kepada sumber daya manusia yang bergerak dibidang komunikasi dan informasi melalui seminar-seminar ataupun melalui kerjasama dengan Media massa sehingga SDM dapat diandalkan dalam pelaksanaan tugas dibidang komunikasi dan informasi

Dapat kami jelaskan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat belum menerima usulan dari masyarakat program dan kegiatan yang diusulkan ini adalah murni dari Sekretariat DPRD karena untuk mendukung kelancaran tugas dalam rangka memfasilitasi tugas-tugas DPRD dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kalau diperhatikan usulan program dan kegiatan yang diusulkan tahun 2017 dikaitkan dengan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dirasa tidak akan berpengaruh terhadap tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD karena hanya program yang digabungkan dalam pengusulan Program tahun 2017 namun kegiatan yang disajikan masih relevan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Berikut ini kami sajikan Tabel T.VI.C.9

TABEL T.VI.C.9

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2017  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**SEKRETARIAT DPRD**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>				
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Padang	Terciptanya pelayanan surat menyurat yang baik	6000	Surat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Padang	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 thn	4	1 ktr, 2 RD dan 1 mess
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Padang	Terlaksananya pembayaran pajak bumi dan bangunan, dan asuransi kendaraan	1 PAKET	PBB 1 unit Gedung Kantor. 1 rmh dinas dan 1 mess dan 68 unit asuransi kendaraan
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Padang	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan rumah dinas	1 Tahun	12bln
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Padang	Tersedianya alat tulis kantor	1 tahun	12 bln
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Padang	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor yang tersedia kop surat, amplop, map,	1 tahun	12 bln

			buku kenang-kenangan dan papan nama		
7	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Padang	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	1 tahun	unit gedung kantor
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	paket
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Padang	Tersedianya peralatan rumah tangga DPRD	1 paket	paket
10	Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip	Padang	Tersedianya Dokumen/Arsip	1 tahun	Dokumentasi 19 Perda
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Padang	Tersedianya bahan bacaan dan buku-buku peraturan	1 tahun	buku dan bahan bacaan
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Padang	Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat	1 tahun	12 bln
13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Sumatera Barat dan Prov. Luar Sumbar	Terfasilitasinya keikutsertaan tenaga aparatur Sekretariat DPRD untuk rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah bagi pimpinan dan anggota dewan	124 kali	laporan perjalanan dinas
14	Penyediaan Jasa Sopir	Padang	Tersedianya tenaga sopir	5 org	org
15	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Padang	Tersedianya makanan dan minuman	1 tahun	bln

16	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Padang	Terselenggaranya pembinaan fisik dan mental aparatur	1 tahun	bln
II	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>				
16	Pembangunan Gedung Kantor	Padang	Tersedianya fasilitas kerja PNS dan Anggota DPRD	1 unit	unit
17	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Padang	Tersedianya kebutuhan Kendaraan bermotor	2 unit kendaraan roda 4	unit
18	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	Padang	Tersedianya kebutuhan peralatan rumah jabatan/dinas	1 paket	paket
19	Pengadaan Meubilleur	Padang	Tersedianya kebutuhan meubilleur	1 paket	paket
20	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Padang	Tersedianya komputer dan jaringan untuk menunjang kelancaran tugas	1 paket	paket
21	Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi	Padang	Tersedianya alat studio, alat komunikasi dan alat informasi	1 paket	paket
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Padang	Terlaksananya pemeliharaan rutin rumah jabatan	1 paket	unit
23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Padang	Terpeliharanya gedung kantor	1 tahun	bln
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Padang	Terpeliharanya mobil jabatan	5 unit	unit
25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Padang	Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	53 unit	unit
26	Pemeliharaan Rutin/Berkala	Padang	Terlaksananya pemeliharaan	1 tahun	paket

	Peralatan dan Perlengkapan rumah jabatan		peralatan dan perlengkapan rumah jabatan		
27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Padang	Terlaksananya pemeliharaan mobeleur	1 tahun	bln
28	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi dan jaringan	Padang	Terpeliharanya instalasi litrik,telepon dan air	1 tahun	paket
29	Pemeliharaan komputer dan jaringan komputerisasi	Padang	Terlaksananya apemeliharaan rutin computer dan jaringan	1 tahun	paket
30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang	Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan gedung kantor	1 tahun	paket
31	Pemeliharaan rutin/berkala alat studio, komunikasi dan informasi	Padang	Terlaksananya pemeliharaan rutin alat studio alat komunikasi, alat informasi	1 tahun	paket
32	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Padang	Tertata pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Asset SKPD	1 tahun	bln
III	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DISIPLIN APARATUR</b>				
33	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Padang	Tersedianya Pakaian dinas PNS/PH dan Anggota DPRD	419 stel	stel
IV	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>				

34	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Sumatera Barat dan Prov. Luar Sumbar	PNS/Aparatur yang dikirim untuk mengikuti sosialisasi	30 org	orang
35	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Sumatera Barat dan Prov. Luar Sumbar	Terlaksananya Bimtek bagi aparatur	24 org	orang
36	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Prov. Luar Sumbar	Terlaksananya Peningkatan Wawasan aparatur melalui sharing informasi dan studi komparatif	41 org	bagian
37	Pelatihan Kantor Sendiri	Padang	Terlaksananya pelatihan bagi Pegawai Sekrt.DPRD	50 org	paket
V	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>				
38	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Padang	Tersusunnya laporan kinerja SKPD (Lakip, LKPJ, dan laporan akhir tahun serta laporan semester)	4 dokumen	jenis laporan
39	Penatausahaan Keuangan SKPD	Padang	Terlaksananya Penata Usahaan/Administrasi Keuangan dengan baik	1 tahun	bln
40	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Padang	Tersusunnya Rencana Anggaran Sekrt.DPRD	4 dokumen angg	macam dokumen
VI	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT</b>				

	DAERAH				
41	Pembahasan Rancangan Perda	Sumatera Barat dan Prov. Luar Sumbar	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda dan Keputusan DPRD	19 perda	Perda/Keputusan DPRD
42	Reses	Sumatera Barat	Tertampungnya Aspirasi Masyarakat pada 19 Kab.Kota	3 kali reses	1 reses kelompok, 2 reses perorangan
43	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Sumatera Barat	Terseleenggaranya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	12 kegiatan	kegiatan
44	Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD	Sumatera Barat dan Prov. Luar Sumbar	Terlaksananya studi komperatif ke provinsi yang dianggap berhasil dibanding Provinsi Sumatera Barat dan terseleenggaranya workshop bagi anggota DPRD	65 org	Anggota DPRD
45	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Sumatera Barat dan Prov. Luar Sumbar	Terfasilitasinya keikutsertaan anggota DPRD dan sosialisasi peraturan perundang-undangan	45 org	orang
46	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi ke luar Daerah	Sumatera Barat dan Prov. Luar Sumbar	Terselenggaranya kunker pimpinan dan komisi-komisi ke luar daerah	<b>22 kali</b>	kali
47	Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah	Padang	Tersedianya makanan dan minuman tamu DPRD	<b>1 paket</b>	paket
48	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Sumatera Barat dan Prov. Luar Sumbar	Terjalannya kerjasama permasalahan Peraturan Perundang-undangan	5 kali	laporan

49	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, keserasian peraturan perundang-undangan	Sumatera Barat dan Prov. Luar Sumbar	Terlaksananya kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, keserasian peraturan Perundang-undangan	4 kali	laporan
50	Seminar dalam Rangka Pembahasan Ranperda	Sumatera Barat dan Prov. Luar Sumbar	Terlaksananya legalisasi rancangan Peraturan Daerah	5 kali	rekomendasi
51	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Sumatera Barat dan Prov. Luar Sumbar	Tersedianya dokumen pelaksanaan kegiatan ke dewan	1 paket	bln
52	Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya komunikasi dan informasi	Sumatera Barat dan Prov. Luar Sumbar	Tersedianya sumber daya komunikasi dan informasi	1 paket	kegiatan

### BAB III

#### TUJUAN, SASARAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM KEGIATAN

##### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan tugas pokok Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah dibidang pemerintahan umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang secara Administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis bertanggung jawab kepada DPRD yaitu membantu kelancaran tugas-tugas DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Menyangkut kebijakan Nasional dalam pelaksanaan pembangunan dibidang pemerintahan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah ( RPJMD ) Sumatera Barat pada Prioritas II Yaitu Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan, Sekretariat DPRD mendukung rencana yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu Reformasi Birokrasi dibidang pemerintahan yaitu dengan meningkatkan Disiplin Aparatur, mencegah terjadinya perbuatan KKN, meningkatkan kemampuan SDM dibidang tugasnya. dan mendukung pelaksanaan Program Nasional yaitu Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Program Pokok yang tertuang dalam dokumen RPJMN yang diakomodir dalam RPJMD yaitu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah adalah satu program nasional yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan beberapa kegiatan yang mempunyai sasaran, tujuan dan kebijakan sudah sesuai dengan Kebijakan Nasional dan ditambah dengan beberapa program lainnya sebagai pendukung program pokok dalam memfasilitasi DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan hak sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Program dan kegiatan tersebut sudah dituangkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

##### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan adalah merupakan suatu yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu analisis strategis yang tepat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Maka sesuai dengan pernyataan Visi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang merupakan hasil penyempurnaan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi RI yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD

Dari hasil Musyawarah Sekretariat DPRD yang dilakukan oleh Sekwan bersama Kepala Bagian dan Kasubag terkait maka Visi Sekretariat DPRD yaitu **Menjadi Sekretariat Dewan Terbaik dalam Memfasilitasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD** dengan misi yaitu: **Memberikan pelayanan kepada DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan hak DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada DPRD, dan Meningkatkan kualitas Aparatur dalam memberikan pelayanan kepada DPRD** maka dirumuskan tujuan dari masing-masing misi tersebut di atas sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Terwujudnya Pelayanan Prima terhadap pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang dan hak DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat dalam menyampaikan Aspirasi ke DPRD
3. Terwujudnya kualitas Sumber Daya aparatur dalam menunjang kegiatan DPRD

Dari tujuan yang dirumuskan di atas maka Sekretariat DPRD Prov.Sumatera Barat menetapkan **sasaran** yang akan dicapai, adapun sasaran yang akan dicapai Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat berdasarkan pada arti dari sasaran itu sendiri adalah sbb :

Sasaran merupakan suatu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan maka dirumuskanlah sasaran-sasaran yang terkandung dalam misi pertama, misi kedua dan misi ketiga.

Adapun Sasaran yang terkandung dalam misi Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

Sasaran dari Misi **pertama** adalah Terlaksananya Fungsi, tugas, wewenang dan hak DPRD sesuai dengan waktu dan target yang telah ditetapkan

Sasaran dari Misi **kedua** adalah Meningkatkan pelayanan penyampaian aspirasi masyarakat kepada DPRD dan selanjutnya sasaran dari Misi **ketiga** adalah sebagai berikut :

1. Tersedia Sumber Daya Aparatur yang berkualitas untuk menunjang tugas pokok dan fungsi DPRD
2. Penempatan staf sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki
3. Meningkatkan disiplin staf dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

Dari sasaran tersebut di atas harus didukung oleh kebijakan yang akan menentukan berhasil atau tidaknya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017, adapun kebijakan yang akan dilakukan adalah :

1. Melakukan Evaluasi dan Peninjauan terhadap kebijakan-kebijakan terdahulu yang telah dilakukan dan mengantisipasi terjadinya perbedaan persepsi antara pemerintah daerah dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
2. Melakukan evaluasi terhadap Sumber Daya Manusia ( SDM ) dan pemetaan potensi personil dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana guna mendukung kelancaran tugas dalam memfasilitasi kegiatan Dewan
3. Meningkatkan hubungan kerja yang harmonis antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah dan perangkatnya serta Lembaga Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan
5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia aparatur yang lebih baik

### 3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mencapai visi dan misi kepala daerah yang didukung oleh Visi dan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat maka untuk mewujudkan sasaran dan kebijakan tahun 2017, maka Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat mengusulkan dan merencanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

#### a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

##### Kegiatan :

##### 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya pengiriman surat yang tepat sasaran dalam menunjang dan meningkatkan kinerja sekretariat DPRD dengan lokasi kegiatan Sumatera Barat dan Luar Sumatera Barat.

##### 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tercapainya kebutuhan komunikasi, air, listrik dan internet sebagai penunjang kelancaran kerja, dengan lokasi kegiatan adalah Padang

##### 3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya peralatan kantor yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran tugas-tugas Sekretariat DPRD dengan lokasi kegiatan adalah Padang

##### 4. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan kantor dan rumah dinas DPRD serta pembayaran jaminan Asuransi Kendaraan Dinas DPRD, dengan lokasi kegiatan adalah Padang.

##### 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya ruang kerja yang bersih dan nyaman serta terjaganya kebersihan rumah dinas, dengan lokasi kegiatan adalah Padang.

##### 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya alat tulis kantor penunjang kelancaran tugas, dengan lokasi kegiatan adalah Padang.

##### 7. Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip

Hasil yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah terdapatnya arsip-arsip di DPRD khususnya dokumen DPRD yang berbentuk produk-produk hukum, dengan lokasi kegiatan adalah Padang

**8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah tercapainya ketersediaan bahan hasil kerja yang dicetak dan digandakan sesuai kebutuhan, dengan lokasi kegiatan adalah Padang

**9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya penerangan pada bangunan perkantoran, dengan lokasi kegiatan adalah Padang

**10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**

Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya peralatan rumah tangga untuk mewujudkan peningkatan pelayanan dalam rangka memfasilitasi rapat-rapat dinas, dengan lokasi kegiatan adalah Padang

**11. Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**

Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan wawasan bagi anggota DPRD/Pegawai. Hasil yang akan dicapai dengan pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam bentuk pengadaan surat kabar dan pengadaan buku-buku peraturan perundang-undangan, dengan lokasi kegiatan adalah Padang.

**12. Penyediaan Makanan dan Minuman**

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat demi terwujudnya keamanan rapat dan kenyamanan bagi pengamanan pengunjung, dengan lokasi kegiatan adalah Padang

**13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah**

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah, dengan lokasi kegiatan adalah Padang

**14. Penyediaan Jasa Sopir**

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya distribusi surat menyurat ke daerah kab/kota di Sumatera Barat dan Dinas/SKPD dalam Provinsi Sumatera Barat, dengan lokasi kegiatan adalah Sumatera Barat

**15. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor.**

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam rangka terwujudnya keamanan pada Kantor serta Rumah Jabatan Pimpinan Dewan, dengan lokasi kegiatan adalah Padang

**16. Penyediaan Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur**

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya pembinaan fisik dan mental aparatur DPRD Provinsi Sumatera Barat, dengan lokasi kegiatan

adalah Padang

#### **17. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD**

Hasil yang akan dicapai kegiatan ini adalah untuk terpeliharanya kesehatan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Anggota keluarganya, dengan lokasi kegiatan adalah Padang

#### **b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

**Kegiatan :**

##### **1. Pembangunan Gedung Kantor**

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya ruangan yang representative untuk melaksanakan tugas-tugas baik bagi Anggota DPRD maupun bagi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, dengan harapan tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan baik dengan hasil yang sangat memuaskan, dengan lokasi kegiatan adalah Padang.

##### **2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional**

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan ini adalah terwujudnya kelancaran kegiatan dewan, dengan lokasi kegiatan adalah Padang

##### **3. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas/Mess**

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan ini adalah terwujudnya peningkatan pelayanan pada rumah dinas/mess, dengan lokasi kegiatan adalah Padang

##### **4. Pengadaan Meubelaur**

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan meubeleaur kantor dan rumah dinas DPRD Provinsi Sumatera Barat, dengan lokasi kegiatan adalah Padang

##### **5. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi**

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya peralatan kantor dibidang computer untuk mewujudkan peningkatan pelayanan perkantoran, dengan lokasi kegiatan adalah Padang

##### **6. Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi**

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya alat monitor keperluan arapat-rapat DPRD Provinsi Sumatera Barat, dengan lokasi kegiatan adalah Padang.

##### **7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas dan Mess**

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan rumah jabatan pimpinan DPRD, dengan lokasi kegiatan adalah Padang

##### **8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor**

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya gedung kantor

DPRD dengan baik, dengan lokasi kegiatan adalah Padang.

**9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan**

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya dengan baik mobil jabatan Pimpinan, dengan lokasi kegiatan adalah Padang

**10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional**

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional DPRD, dengan lokasi kegiatan adalah Padang

**11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan /Dinas.**

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan terhadap rumah jabatan/dinas DPRD, dengan lokasi kegiatan adalah Padang.

**12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur**

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya mebeleur DPRD, dengan lokasi kegiatan adalah Padang

**13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan**

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan terhadap Instalasi dan Jaringan Kantor DPRD, dengan lokasi kegiatan adalah Padang

**14. Pemeliharaan Rutin/berkala Komputer dan jaringan komputerisasi**

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terpeliharanya peralat computer dan jaringan untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan, dengan lokasi kegiatan adalah Padang

**15. Pemeliharaan Rutin / berkala alat studio, alat komunikasi dan alat informasi**

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terpeliharanya alat-alat studio dan alat komunikasi untuk mendukung kelancaran tugas-tugas, dengan lokasi kegiatan adalah Padang.

**16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor.**

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan lokasi kegiatan adalah Padang.

**17. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD**

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terkelola, terawasi dan terkendalikan asset-asset yang ada di DPRD, dengan lokasi kegiatan adalah Padang.

**c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

**Kegiatan :**

**1. Penyediaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya**

Hasil yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Terwujudnya peningkatan disiplin dan pelayanan aparatur pakaian dinas PNS/PH dan Anggota DPRD, dengan lokasi kegiatan adalah Padang.

**d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

**Kegiatan :**

**1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan**

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan, antara lain adalah peningkatan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan, dengan lokasi kegiatan adalah Sumatera Barat dan Luar Sumatera Barat

**2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan**

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya peningkatan wawasan aparatur tentang peraturan perundang-undangan, dengan lokasi kegiatan adalah Sumatera Barat dan Luar Sumatera Barat

**3. Pengembangan Sumber Daya Manusia ( SDM )**

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya SDM aparatur dibidang pengelolaan keuangan, pengelolaan asset dan pengelola penatausahaan, dengan lokasi kegiatan luar Sumatera Barat

**4. Pelatihan Kantor Sendiri**

Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah unbtuk meningkatkan kemampuan staf Sekeretariat DPRD dalam melaksanakan tugas-tugas terutama dalam hal tata naskah dinas, dengan lokasi kegiatan adalah Padang

**e. Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan**

**Kegiatan :**

**1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

Hasil yang akan di capai dari pelaksanaan kegiatan ini antara lain terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja keuangan, dengan lokasi kegiatan adalah Padang

**2. Penatausahaan Keuangan SKPD**

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan, antara lain adalah terwujudnya penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan lokasi kegiatan adalah Padang

**3. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD**

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini antara lain terlaksananya penyusunan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD, dengan lokasi kegiatan adalah Padang

**f. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga perwakilan Rakyat Daerah**

**Kegiatan :**

**1. Pembahasan Rancangan Perda**

Hasil yang akan dicapai dengan kegiatan ini berupa terwujudnya pembahasan rancangan peraturan daerah menjadi perda dari keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat sebanyak 20 buah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui konsultasi, serta rapat-rapat alat kelengkapan DPRD dengan eksekutif, dengan lokasi kegiatan adalah Sumatera Barat dan Luar Sumatera Barat

**2. Reses**

Hasil yang akan dicapai dan pelaksanaan kegiatan ini adalah terjaringnya aspirasi masyarakat pada 19 Kabupaten / Kota yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil reses. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kunjungan ke daerah, identifikasi permasalahan ke Kabupaten / Kota, pertemuan / konsultasi / diskusi dengan masyarakat /dinas/instansi terkait di Kabupaten / Kota, dengan lokasi kegiatan adalah Sumatera Barat

**3. Kunjungan Kerja Pimpinan, Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD**

Hasil yang akan dicapai dan pelaksanaan kegiatan ini adalah terjalinnya komunikasi pimpinan dan anggota DPRD dengan masyarakat daerah pemilihan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kunjungan kerja ke daerah Kabupaten / Kota, pertemuan / konsultasi / diskusi dengan masyarakat / dinas / instansi di Kabupaten / Kota, dengan lokasi kegiatan adalah Sumatera Barat.

**4. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD serta sekretaris DPRD**

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas SDM dewan dan Setwan di dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu legislasi, penganggaran dan pengawasan serta Sekretariat DPRD di dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui workshop, seminar, studi banding, pendidikan dan pelatihan serta konsultasi baik regional maupun nasional, dengan lokasi kegiatan adalah Luar Sumatera Barat

**5. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan**

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan, antara lain adalah terwujudnya peningkatan wawasan dewan tentang peraturan perundang-undangan, dengan lokasi kegiatan adalah Luar Sumatera Barat.

**6. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi-komisi ke Luar Daerah**

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya peningkatan wawasan dan kinerja DPRD di dalam menjalankan tugas dan fungsi yaitu ; legislasi, penganggaran dan pengawasan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kunjungan kerja, pertemuan / konsultasi / diskusi ke Propinsi lain, dengan lokasi kegiatan adalah luar Sumatera Barat.

**7. Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah**

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlayannya tamu-tamu DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, dengan lokasi kegiatan adalah Padang

**8. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan**

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini terwujudnya pemahaman yang sama terhadap permasalahan peraturan perundang-undangan, dengan lokasi kegiatan Luar Sumatera Barat.

**9. Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, keserasian peraturan perundangan.**

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini terwujudnya keserasian peraturan perundang-undangan, dengan lokasi kegiatan adalah Sumatera Barat dan Luar Sumatera Barat.

**10. Seminar Dalam Rangka Pembahasan Ranperda**

Hasil yang akan di capai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya peningkatan pemahaman terhadap produk hukum, dengan lokasi kegiatan adalah Sumatera Barat.

**11. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah**

Hasil yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah terpublikasikannya produk-produk DPRD kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui hasil kerja yang dilakukan oleh DPRD sebagai wakilnya di lembaga legislative, dengan lokasi kegiatan adalah Sumatera Barat

**6. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi**

Hasil yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah terbinanya sumber daya aparatur dibidang komunikasi dengan menjalin kerjasama dengan media massa, dengan lokasi kegiatan adalah Sumatera Barat

Dari Usulan Program dan Kegiatan yang kami ajukan pada tahun 2017 ada kegiatan yang tidak sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) diantara kegiatan dimaksud terdapat dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan Penyediaan Jasa sopir, kegiatan ini pada awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun 2016 tidak ada namun karena kebutuhan yang sangat mendesak maka kegiatan pada tahun 2016 dimunculkan, guna untuk menunjang kegiatan dalam memfasilitasi kegiatan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan fungsi sebagai fungsi Legislasi, fungsi Anggaran dan fungsi pengawasan.

### 3.4 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

Pada tahun 2017 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat merencanakan 6 ( enam ) program dengan jumlah kegiatan sebanyak 55 ( lima puluh lima ) kegiatan dengan jumlah plafon dana sebesar Rp 90.202.408.082,- (Sembilan puluh milyar dua ratus dua juta empat ratus delapan ribu delapan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

<b>a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Rp.14.138.863.757,-</b>
<b>Kegiatan :</b>	
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 1.192.814.000,-
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 1.741.740.000,-
3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Rp 307.950.000,-
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp. 710.701.725,-
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 313.284.250,-
6. Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip	Rp 374.143.000,-
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 370.745.000,-
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 79.442.300,-
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 676.520.000,-
10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 226.900.000,-
11. Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 657.308.500,-
12. Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp. 590.985.000,-
13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	Rp. 5.426.552.000,-
14. Penyediaan Jasa Sopir	Rp 305.232.700,-
15. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Rp. 717.395.282,- Rp. 57.150.000,-
17. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp 390.000.000,-

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 17 kegiatan dengan pagu sebesar Rp **14.138.863.757** (Empat belas milyar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) pelaksanaannya adalah di Wilayah Sumatera

Barat dan Kota Padang.

**b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** **Rp. 23.202.407.119,-**

**Kegiatan :**

1.	Pembangunan Gedung Kantor	Rp 16.000.000.000,-
2.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 46.000.000,-
3.	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	Rp 534.500.000,-
4.	Pengadaan Meubeleur	Rp 147.500.000,-
5.	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Rp 632.468.750,-
6.	Pengadaan Alat Studio, alat komunikasi informasi	Rp. 288.000.000,-
7.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Rp. 505.478.375,-
8.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp. 783.754.400,-
9.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Rp. 497.400.000,-
10.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Rp. 3.475.670.000,-
11.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Rp. 154.000.000,-
12.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Rp. 39.250.000,-
13.	Pemeliharaan Rutin/berkala Instalasi dan Jaringan	Rp 80.000.000,-
14.	Pemeliharaan Rutin/berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Rp. 69.250.000,-
15.	Pemeliharaan rutin/berkala alat studio, alat komunikasi Dan alat informasi	Rp 99.400.000,-
16.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan Kantor	Rp. 410.250.000,-
17.	Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian asset SKPD	Rp 276.092.000,-
18.	Rehab sedang / berat rumah jabatan	Rp. 40.000.000,-

Program Peningkatan Saarana dan Prasarana dengan 18 kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 24.079.013.525,- (Dua puluh empat milyar tujuh puluh Sembilan juta tiga belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) pelaksanaannya adalah di Wilayah Sumatera Barat dan Kota Padang

- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur** **Rp. 763.220.000,-**
- Kegiatan :**
1. Penyediaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya **Rp. 763.220.000,-**
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan 1 kegiatan dengan pagu dana sebesar Rp 763.220.000,- ( Tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) pelaksanaan kegiatannya adalah dalam Wilayah Sumatera Barat ( Kota Padang )
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** **Rp. 826.363.000,-**
- Kegiatan :**
1. Sosialisasi .Peraturan Perundang-undangan **Rp. 132.458.000,-**
  2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan **Rp. 206.166.000,-**
  3. Pengembangan Sumber Daya Manusia **Rp. 353.144.000,-**
  4. Pelatihan Kantor Sendiri **Rp. 134.595.000,-**
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur dengan 4 kegiatan dengan pagu dana sebesar Rp 826.363.000,- (Delapan ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) pelaksanaan kegiatannya ada diluar Wilayah Sumatera Barat dan didalam Wilayah Sumatera Barat
- e. Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan** **Rp. 433.504.800,-**
- Kegiatan :**
- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD **Rp. 87.968.000,-**
  - b. Penatausahaan Keuangan SKPD **Rp. 260.536.800,-**
  - c. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD **Rp. 85.000.000,-**
- Program Peninkatgan Pengembangan Sistem Pelapaoran Capaian Kinerja Keuangan dengan 3 (tiga) kegiatan dengan usulan pagu dana sebesar Rp 433.504.800,- (Empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat ribu delapan ratus rupiah) pelaksanaan kegiatannya ada dalam Kota Padang
- f. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga perwakilan Rayat Daerah** **Rp 49.961.443.000,-**
- Kegiatan :**
1. Pembahasan Rancangan Perda **Rp.17.430.830.000,-**
  2. Reses **Rp. 5.352.920.000,-**
  3. Kunjungan Kerja Pimpinan, Anggota DPRD

	Dan Sekretaris DPRD dalam Daerah	Rp.10.623.437.000,-
4.	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD serta sekretaris DPRD	Rp. 4.905.132.500,-
5.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Rp. 191.950.000,-
6.	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi-komisi ke Luar Daerah	Rp. 5.426.484.000,-
7.	Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah	Rp. 1.559.048.000,-
8.	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang – undangan	Rp. 78.663.000,-
9.	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, keserasian peraturan perundangan.	Rp. 88.038.500,-
10.	Seminar Dalam Rangka Pembahasan Ranperda	Rp. 359.055.000,-
11.	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Rp 3.529.023.000,-
12.	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Rp 416.862.000,-

Program Peningkatgan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan 12 kegiatan dengan usulan pagu dana sebesar Rp 49.961.443.000,- (Empat puluh Sembilan milyar Sembilan ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) pelaksanaan kegiatannya ada diluar Wilayah Sumatera Barat dan didalam Wilayah Sumatera Barat

Kami menyadari bahwa usulan Program dan kegiatan ini tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD karena ada kegiatan yang tidak terdapat dalam Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maka kami berharap usulan ini dapat diterima dan dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2017

Dapat dilihat Tabel T.VI.C.10

**Tabel T.VI.C.10**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017**  
**DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**SEKRETARIAT DPRD**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>				<b>14.138.863.757</b>				<b>14.138.863.757</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terciptanya pelayanan surat menyurat yang baik	Padang	100	1.192.814.000	APBD		100	1.192.814.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber	Tersedianya jasa komunikasi,	Padang	100	1.741.740.000	APBD		100	1.741.740.000

	daya air dan listrik	sumber daya air dan listrik 1 thn						
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pembayaran pajak bumi dan bangunan, dan asuransi kendaraan	Padang	100	307.950.000	APBD	100	307.950.000
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan rumah dinas	Padang	100	710.701.725	APBD	100	710.701.725
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Padang	100	313.284.250	APBD	100	313.284.250
6	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip	Terdata dokumen/arsip dengan baik	Padang	100	374.143.000	APBD	100	374.143.000
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor yang tersedia kop surat, amplop, map, buku kenang-kenangan dan papan nama	Padang	100	370.745.000	APBD	100	370.745.000

8	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	Padang	100	79.442.300	APBD		100	79.442.300
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Padang	100	676.520.000	APBD		100	676.520.000
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga DPRD	Padang	100	226.900.000	APBD		100	226.900.000
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan buku-buku peraturan	Padang	100	657.308.500	APBD		100	657.308.500
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat	Padang	100	590.985.000	APBD		100	590.985.000
13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terfasilitasinya keikutsertaan tenaga aparatur Sekretariat DPRD untuk rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	Sumatera Barat dan Prov. Luar Sumbar	100	5.426.552.000	APBD		100	5.426.552.000

		dan dalam daerah bagi pimpinan dan anggota dewan						
14	Penyediaan Jasa Sopir	Tersedianya Tenaga Sopir	Padang	100	305.232.700	APBD	100	305.232.700
15	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya jasa pengaman kantor	Padang	100	717.395.282	APBD	100	717.395.282
16	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Terselenggaranya pembinaan fisik dan mental aparatur	Padang	100	57.150.000	APBD	100	62.865.000
17	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan	Tersedianya jasa pemeliharaan kesehatan anggota DPRD dan keluarga	Padang	100	390.000.000	APBD	100	390.000.000
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>				<b>23.202.407.119</b>			<b>23.202.407.119</b>
18	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Fasilitas tempat kerja	Padang	100	16.000.000.000	APBD	100	16.000.000.000

19	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kebutuhan Kendaraan bermotor	Padang	100	46.000.000	APBD		100	46.000.000
20	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	Tersedianya kebutuhan peralatan rumah jabatan	Padang	100	534.500.000	APBD		100	534.500.000
21	Pengadaan Menubelaur	Tersedianya kebutuhan meubelaur	Padang	100	147.500.000	APBD		100	147.500.000
22	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Tersedianya 88omputer dan jaringan untuk menunjang kelanacaran tugas	Padang	100	632.468.750	APBD		100	632.468.750
23	Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi	Tersedianya alat studio , alat komunikasi dan alat informasi	Padang	100	288.000.000	APBD		100	288.000.000
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin rumah jabatan	Padang	100	505.478.375	APBD		100	505.478.375

25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Padang	100	783.754.400	APBD		100	783.754.400
26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan	Padang	100	497.400.000	APBD		100	497.400.000
27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	Padang	100	3.475.670.000	APBD		100	3.475.670.000
28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Terlaaksananya pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan rumah jabatan	Padang	100	154.000.000	APBD		100	154.000.000
29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur	Terpeliharanya meubileur	Padang	100	39.250.000	APBD		100	39.250.000
30	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi dan jaringan	Terpeliharanya instalasi dan jaringan	Padang	100	80.000.000	APBD		100	80.000.000
31	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi	Terlaksananya pemeliharaan rutin computer dan jaringan computer kantor	Padang	100	69.250.000	APBD		100	69.250.000

		DPRD Sumbar							
32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	Padang	100	410.250.000	APBD		100	410.250.000
33	Pemeliharaan rutin/berkala alat studio, komunikasi dan informasi	Terlaksananya pemeliharaan rutin alat studio alat komunikasi, alat informasi	Padang	100	99.400.000	APBD		100	99.400.000
34	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Tertata pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Asset SKPD	Padang	100	276.092.000	APBD		100	276.092.000
35	Rehab Sedang/Berat Rumah Jabatan	Terlaksananya rehab rumah dinas	Padang	100	40.000.000	APBD		100	40.000.000
III	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DISIPLIN APARATUR</b>				<b>763.220.000</b>	APBD		100	<b>763.220.000</b>
35	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian dinas PNS/PH dan	Padang	100	763.220.000	APBD		100	763.220.000

		Anggota DPRD						
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>				<b>826.363.000</b>			<b>826.363.000</b>
36	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	PNS/Aparatur yang dikirim untuk mengikuti sosialisasi	Sumatera Barat dan Prov. Luar Sumbar	100	132.458.000	APBD	100	132.458.000
37	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimtek bagi aparatur	Sumatera Barat dan Prov. Luar Sumbar	100	206.166.000	APBD	100	206.166.000
38	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkanya Wawasan aparatur melalui sharing informasi dan studi komparatif	Prov. Luar Sumbar	100	353.144.000	APBD	100	353.144.000
39	Pelatihan Kantor Sendiri	Terlaksananya Pelatihan bagi Pegawai	Padang	100	134.595.000	APBD	100	134.595.000

		Sekrt.DPRD						
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>				<b>433.504.000</b>			<b>433.504.000</b>
40	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan kinerja SKPD (Lakip, LKPJ, dan laporan akhir tahun serta laporan semester)	Padang	100	87.968.000	APBD	100	87.968.000
41	Penatausahaan Keuangan SKPD	Terlaksananya Penata Usahaan/Administrasi Keuangan dengan baik	Padang	100	260.536.800	APBD	100	260.536.800
42	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tesusunnya Rencana Kerja Tahunan SKPD	Padang	100	85.000.000	APBD	100	85.000.000
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN</b>				<b>49.961.443.000</b>			<b>49.961.443.000</b>

	<b>KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>								
43	Pembahasan Rancangan Perda	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda dan Keputusan DPRD	Sumatera Barat dan Prov. Luar Sumbar	100	17.430.830.000	APBD		100	17.430.830.000
44	Reses	Tertampungnya Aspirasi Masyarakat pada 19 Kab.Kota	Sumatera Barat	100	5.352.920.000	APBD		100	5.352.920.000
45	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Terseleenggaranya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Sumatera Barat	100	10.623.437.000	APBD		100	10.623.437.000
46	Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD	Terlaksananya studi komperatif ke provinsi yang dianggap berhasil dibanding Provinsi Sumatera Barat dan	Sumatera Barat dan Prov. Luar Sumbar	100	4.905.132.500	APBD		100	4.905.132.500

		terselenggaranya workshop bagi anggota DPRD						
47	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terfasilitasinya keikutsertaan anggota DPRD dan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Sumatera Barat dan Prov. Luar Sumbar	100	191.950.000	APBD	100	191.950.000
48	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi ke luar Daerah	Terselenggaranya kunker pimpinan dan komisi-komisi ke luar daerah	Sumatera Barat dan Prov. Luar Sumbar	100	5.426.484.000	APBD	100	5.426.484.000
49	Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah	Tersedianya makanan dan minuman tamu DPRD	Padang	100	1.559.048.000	APBD	100	1.559.048.000
50	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Terjalinnnya kerjasama permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Sumatera Barat dan Prov. Luar Sumbar	100	78.663.000	APBD	100	78.663.000

51	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, keserasian peraturan perundang-undangan	Terlaksananya kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, keserasian peraturan Perundang-undangan	Sumatera Barat dan Prov. Luar Sumbar	100	88.038.500	APBD		100	88.038.500
52	Seminar dalam Rangka Pembahasan Ranperda	Terlaksananya legalisasi rancangan Peraturan Daerah	Sumatera Barat dan Prov. Luar Sumbar	100	359.055.000	APBD		100	359.055.000
53	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Tersedianya dokumen pelaksanaan kegiatan ke dewan	Sumatera Barat dan Prov. Luar Sumbar	100	3.529.023.000	APBD		100	3.529.023.000
54	Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya	Tersedianya sumber daya komunikasi dan	Sumatera Barat dan Prov.	100	416.862.000	APBD		100	416.862.000

	komunikasi dan informasi	informasi	Luar Sumbar					
		Total			<b>90.202.408.082</b>			<b>90.202.408.082</b>

**BAB IV**  
**P E N U T U P**

Rencana Kerja (Renja) SKPD Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun Tahun 2017 yang merupakan suatu acuan atau pedoman bagi pelaksana kegiatan yang mempunyai kelenturan dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis sepanjang proses kegiatan tersebut sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Dengan Rencana Kerja (Renja) ini pula diharapkan akan terjadi sinkronisasi dan sinergis antar unit kerja organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dan atau dengan Dinas, Badan, Lembaga, dalam bentuk penyelenggaraan tugas dan kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tuntutan masyarakat, dengan harapan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) ini sangat ditentukan oleh komitmen dan dukungan semua tingkatan dalam unit organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Untuk dapat menjadi perhatian kita bersama bahwa usulan program dan kegiatan ini adalah merupakan usulan program dari masing-masing pemangku kepentingan ( Bagian ) di DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD dalam pelaksanaan pemerintahan di Daerah Sumatera Barat maka kami berharap usulan program dan kegiatan ini perlu menjadi perhatian semua pihak untuk dapat direalisasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2017 karena program dan kegiatan yang diajukan ini adalah menyangkut kepentingan bersama dalam mendukung visi dan misi kepada daerah dan menunjang tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Demikian harapan kita agar Rencana Kerja (Renja) ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan kepada kita bersama terutama bagi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

**Plt. SEKRETARIS DPRD PROVINSI**  
**SUMATERA BARAT**

**H. RAFLIS, SH.MM**  
**Pembina Tk.I Nip. 19640930 198602 1 002**